

**GOTONG ROYONG DALAM PEMBANGUNAN
DESA**

**(STUDI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
KALIGADING KECAMATAN BOJA KABUPATEN
KENDAL)**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Malihatın

1506016030

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : Lima eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Malihatin

NIM : 1506016030

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Gotong Royong Dalam Pembangunan Desa (Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2022

Pembimbing,

Bidang Subtansi Materi

Dr. H. Moh. Parmudi, M.Si



NIP. 496904252000031001

Tanggal: 13 Juni 2022

Bidang Metodologi & Tatatulis

Rofiq Mahfudz, M.Si



Tanggal: 13 Juni 2022

SKRIPSI

GOTONG ROYONG DALAM PEMBANGUNAN DESA

**(Studi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
Infrastruktur Di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten
Kendal)**

Disusun Oleh:

Malihatn

1506016030

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 28 Juni
2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua

Dr. H. Tholikhathul Khoir, M.Ag

NIP. 197701202005011005

Penguji I

Drs. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 1968050051995031002

Pembimbing I

Dr. H. Moh. Parmudi, M.Si

NIP. 196904252000031001

Sekretaris

Dr. H. Moh. Parmudi, M.Si

NIP. 196904252000031001

Penguji II

Moh. Yamin Darsyah, M.Si

NIP.

Pembimbing II

Rofiq, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 9 Juni 2022



Malihatin

1506016030

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Gotong Royong Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur DI Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S-1 (S.sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dilingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. H. Adit, S.Ag. M.Si dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekertris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. Dr. H. Moh. Parmudi, M.Si dan Rofiq Mahfudz, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar dan tulus serta ikhlas dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Selaku Dewan Penguji yang telah banyak memberikan masukan maupun arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai Ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik dan staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

8. Semua informan yang memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Suwardi Ichsan dan Ibu Hj. Umroh Mahfudhoh yang tiada henti memberikan doa semangat dan nasihat sehingga penulis bisa mencapai pada tahap ini.
10. Untuk Kakak-kakak saya yang luar biasa, dalam memberikan doa dan dukungan yang tanpa henti. Mbak Ima, Mas Nanang, Mas Anang, Mbak A'dhom, Mas Sofa yang selama ini sudah menjadi kakak sekaligus sahabat bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami di luar rumah.
11. Sahabat-sahabat penulis, Alvina Nurmala, Sifa Fauzia, Anicka Muzaeni, Hepy Luberisasi, Fatkhuliyah Rizqiyah, Af'idatun Nisa dan Uswatun Hasanah yang telah membantu dan menyemangati penulis selama proses penyusunan skripsi.
12. Teman-teman Ilmu Politik FISIP 2015 dan KKN Mandiri ke-75 Kelurahan Pakintelan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di bidang non akademik bagi penulis.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbil 'alamin saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi Bapak dan Ibu saya Tercinta, Bapak H. Suwardi Ichsan dan Ibu Hj. Umroh Mahfudhoh yang selalu mendoakan dan mendukung serta menjadi penyemangat penulis selama ini. Kakakku Tercinta, Mbak Eny Imaniyah yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini
Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

“Do’akan yang dikerjakan. Kerjakan yang dido’akan. Sisanya serahkan kepada Tuhan”.

-Gus Rifqil Muslim Suyuthi-
(Pengasuh Ponpes Manba’ul Hikmah Kendal Jawa Tengah)

ABSTRAK

Masyarakat sebagai salah satu subsistem suatu desa harus melibatkan diri dalam proses pembangunan di desa. Keterlibatan itu dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka hasil dari pembangunan belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian dan menganalisis fakta lapangan yang dikaitkan dengan teori. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ditinjau dari beberapa macam diantaranya : Partisipasi masyarakat dengan keterlibatan secara sukarela sangat tinggi baik tenaga maupun uang, Partisipasi masyarakat dengan suatu proses yang aktif dalam hal ini masyarakat aktif dalam partisipasi maupun pembangunan, dan Partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam hal ini partisipasi masyarakat tinggi apalagi dengan adanya rapat sangat maksimal, serta Partisipasi masyarakat dengan melakukan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam hal ini tercipta adanya musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada prinsipnya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa ini sangatlah berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembangunan infrastruktur desa khususnya Di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, penyelenggaraan pembangunan bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah desa saja, melainkan tanggungjawab bersama seluruh masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

The community as one of the subsystems of a village must be involved in the development process in the village. The involvement starts from the development planning stage, implementation, to the supervision stage. Without community involvement, the results of development will not necessarily answer the needs of the community and the welfare of the community has not been achieved. The purpose of this study was to determine community participation in infrastructure development in Kaligading Village, Boja District, Kendal Regency.

This research is a qualitative descriptive study with a case study approach with the aim of understanding the phenomena experienced by the research and analyzing field facts related to the theory. Collecting data in this study using observation, interview and documentation techniques. Data analysis used in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study were reviewed from several types including: Community participation with very high voluntary involvement both in labor and money, Community participation with an active process in this case the community is active in participation and development, and Community participation in contributing in this case high community participation especially with the very maximum meeting, as well as community participation by conducting a dialogue between the local community and the staff in this case creating a deliberation between the community and the village government. In principle, the community in the development of village infrastructure has a major influence on the course of the village infrastructure development process, especially in Kaligading Village, Boja District, Kendal Regency, the implementation of development is not solely the responsibility of the village government, but is a shared responsibility of the entire community.

Keywords: Community Participation, Infrastructure Development

مختصر

يجب أن يشارك المجتمع باعتباره أحد الأنظمة الفرعية للقرية في عملية التنمية في القرية. تبدأ المشاركة من مرحلة التخطيط التنموي والتنفيذ إلى مرحلة الإشراف. بدون مشاركة المجتمع ، فإن نتائج التنمية لن تلبى بالضرورة احتياجات المجتمع ولم تتحقق رفاهية المجتمع. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مشاركة المجتمع في تطوير البنية التحتية في قرية Kaligading ، مقاطعة Boja ، Kendal Regency. هذا البحث عبارة عن دراسة وصفية نوعية مع منهج دراسة الحالة بهدف فهم الظواهر التي يمر بها البحث وتحليل الحقائق الميدانية المتعلقة بالنظرية. جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. يستخدم تحليل البيانات على ثلاث مراحل ، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تمت مراجعة نتائج الدراسة من عدة أنواع بما في ذلك: مشاركة المجتمع مع مشاركة تطوعية عالية جداً في كل من العمل والمال ، والمشاركة المجتمعية مع عملية نشطة في هذه الحالة ، ينشط المجتمع في المشاركة والتنمية ، ومشاركة المجتمع في المساهمة في هذا مشاركة مجتمعية عالية للقضية خاصة مع الاجتماع الأقصى ، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع من خلال إجراء حوار بين المجتمع المحلي والموظفين في هذه الحالة ، مما يؤدي إلى مداولات بين المجتمع وحكومة القرية.. من حيث المبدأ ، فإن المجتمع في تطوير البنية التحتية للقرية له تأثير كبير على مسار عملية تطوير البنية التحتية للقرية ، وخاصة في قرية كاليجادينج ، مقاطعة بوجا ، كيندال ريجنسي ، تنفيذ التنمية ليس من مسؤولية حكومة القرية فقط ، لكنها مسؤولية مشتركة للمجتمع بأكمله.

الكلمات المفتاحية: المشاركة المجتمعية ، تطوير البنية التحتية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
مختصر	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI.....	30
A. Teori Partisipasi.....	30
B. Macam-macam Partisipasi.....	32
C. Teori Pembangunan Infrastruktur.....	36
BAB III LANSKAP DESA KALIGADING	46
A. Sejarah Desa Kaligading.....	46
B. Kondisi Geografis.....	48
C. Kondisi Sosial, Budaya Desa Kaligading	53
D. Infrastruktur Desa Kaligading	56
E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kaligading	59

**BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA.....69**

- A. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya
Gotong Royong Di Desa Kaligading..... 69
- B. Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Proses
Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Kaligading 79
- C. Implikasi Teori Partisipasi..... 87

BAB V PENUTUP 89

- A. Kesimpulan..... 89
- B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Kaligading
Tabel 3	Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Kaligading
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Kaligading
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menganut Agama / Kepercayaan Desa Kaligading
Tabel 6	Jumlah Sarana Ibadah Desa Kaligading

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas akan adanya interaksi sosial antar sesamanya. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh sebab itu didalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan segala permasalahan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan didesa agar supaya akan terciptahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa atau kelurahan yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Dengan disahkannya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir yang lebih baik serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Indrianasari, 2017:2)

Undang-undang ini memaknai desa sebagai fondasi dasar bagi berjalannya suatu sistem politik di suatu desa. Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nuraini, 2010:2)

Undang-undang ini dijadikan acuan formal bagi terselenggaranya suatu sistem pemerintahan di tingkat desa. Desa memiliki peran yang penting khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Salah satu studi yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah Gotong royong dan partisipasi masyarakat di desa Kaligading. Desa Kaligading merupakan desa yang terletak di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Banyak yang menarik dengan desa ini banyak sarana prasarana dan infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan swadaya masyarakat. Tak terhitung berapa ratus juta yang rakyat glontorkan dengan suka rela untuk membangun desanya. Bukan hanya jumlah dana saja tapi juga tenaga yang selalu siap untuk diajak bergotong royong bersama. Desa Kaligading, salah satu dari desa yang dapat dijadikan teladan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Meski hanya memperoleh alokasi dana desa yang cukup, namun dampak pembangunan yang dihasilkan benar-benar dapat dirasakan oleh warganya.

Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomilokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna

mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan akan tercapai pula. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat.

Perilaku gotong royong sebenarnya merupakan kewajiban setiap individu didalam masyarakat. Pada dasarnya sikap gotong royong ini merupakan hal yang positif asalkan jangan bergotong royong atau kerjasama dalam hal keburukan karena itu merupakan sebuah dosa. Sementara itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S. Al-Maidah:2)

Gotong royong dapat diartikan sebagai sesuatu sikap ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan sukarela tanpa adanya imbalan. Sikap gotong royong ini telah melekat pada diri masyarakat pedesaan dan merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang. Sikap gotong royong ini sangat berperan sekali untuk memperlancar pembangunan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan gotong royong yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa selama ini, perlu diarahkan dan dibina sedemikian rupa sehingga dapat menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Gotong royong ataupun tolong-menolong sangat membantu anggota masyarakat yang pada umumnya tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk melakukan seluruh kegiatan hidupnya jika setiap transaksi kegiatan dibayar dengan uang dan benda-benda modal lainnya. Dengan demikian gotong royong untuk membantu kehidupan individu

keluarga sangat mempunyai arti. Dilain pihak mengharapkan kegiatan gotong royong untuk pembangunan juga diperlukan sejumlah dana yang mencukupi. Jadi tegasnya perpaduan antara kegiatan gotong royong dalam segala bentuknya dengan penyediaan-penyediaan dan dan fasilitas tertentu harus dikombinasikan sedemikian rupa sehingga pembangunan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses gotong royong pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ?
2. Partisipasi apa saja yang dilakukan warga dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ?
3. Siapa yang mereferensi politik pemerintah desa sehingga masyarakat ikut dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses (gotong royong) di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa dalam mereferensikan masyarakat agar ikut dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
 - b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
 - c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

E. Tinjauan Pustaka

Terkait gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, tidak sedikit studi yang telah dilakukan oleh para sarjana. Dari beberapa studi yang ada dapat dikelompokkan dengan kajian berikut :

Pertama, studi gotong royong dan pembangunan desa mengkaji tentang partisipasi masyarakat. Diantara studi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Tesyalom, Ronny, dan Sofia dengan judul “ *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*”. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang memfokuskan pada penelitian kualitatif dengan menggambarkan bagaimana besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ditinjau dari keadaan yang ada di desa Sinsingon Barat. Penelitian ini di fokuskan pada partisipasi masyarakat desa Sinsingon Barat dalam pembangunan yang dapat di uraikan melalui partisipasi masyarakat baik ide/pemikiran, waktu, tenaga, materi serta peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. partisipasi masyarakat desa Sinsingon Barat

dalam bentuk pikiran dan ide masih sangat kurang, dimana masih ada masyarakat yang tidak ikut serta menyumbangkan pikiran dan ide yang cemerlang atau kreatif untuk keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, artikel yang ditulis oleh Faisal, Bulkis, dan Hamka dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukamba*". Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, Dari hasil wawancara terlihat bentuk partisipasi masyarakat di Desa Bialo, bentuk partisipasi yang terbesar pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah sumbangan tenaga masyarakat perdesaan lebih memilih untuk berkontribusi menyumbangkan tenaga dibandingkan dengan bentuk partisipasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan ekonominya. Hal ini dapat dipahami dengan jelas oleh karena pola hidup masyarakat desa masih kental dengan sistem kegotong royongan, dimana apabila ada sesuatu kegiatan yang melibatkan sekelompok warga tertentu, maka dengan spontan warga masyarakat lainnya akan ikut membantu, apalagi bila kegiatan tersebut adalah kegiatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kedua, studi pembangunan desa mengkaji tentang partisipasi masyarakat. Diantara studi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Martiana Dwi Rahayu pada tahun 2018 dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*". Dengan menggunakan metode kualitatif, skripsi ini memfokuskan kajian pada partisipasi masyarakat yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat di desa Sinarsari dalam pembangunan infrastruktur (Martiana 2018).

Artikel yang ditulis oleh Firyal, Suprpto, Sunarti. Dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*." Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, yakni dengan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan

lalu dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa. Pemerintah Desa semestinya harus lebih berperan aktif dalam melihat dan memberikan pengetahuan secara mendalam kepada masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi, sehingga program-program pembangunan sesuai dengan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat serta mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Balkis dan Hamka. Dengan judul, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa.*” Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data-data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Partisipasi masyarakat di Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide atau pemikiran. Pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, material dan dana. Sementara pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi hanya berupa sumbangan tenaga.

Dari kajian beberapa sarjana di atas, penulis berpendapat bahwa studi-studi tentang dinamika partisipasi masyarakat selama ini berfokus pada kepemimpinan dan partisipasi warga desa. Namun partisipasi masyarakat di atas berfokus pada kepemimpinan dan tingkat pendidikan sedangkan penelitian saya berfokus pada kesadaran yang hadir dalam diri masyarakat pada proses pembangunan desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menyajikan pemaparan dan penjelasan yang menghasilkan data deskriptif yang berkaitan dengan obyek (masalah) yang diteliti, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu analisis

kesimpulan dari permasalahan yang ada (Sugiono, 2008;45). Menurut Moloeng (2014;6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian misalnya sikap, motivasi, pendapat, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus untuk membantu dalam memahami dan menafsirkan Gotong royong dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa yang menjadi fokus studi ini. Pendekatan studi kasus ini didefinisikan sebagai suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian serta pemahaman secara mendalam dari individu, kelompok atau situasi sosial (Emzir, 2012;20). Studi kasus merupakan strategi penelitian yang lebih cocok pada pertanyaan *how* atau *why* bila penelitian hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dalam *setting* sosial (Robert, 2006:1)

2. Definisi Konseptual

Penelitian ini menggunakan Definisi Konseptual sebagai berikut:

a) Partisipasi masyarakat

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian. Partisipasi merupakan sebuah perwujudan keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Winardi (2005:79) mengemukakan "partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan hal tersebut". Selain itu

Santoso Sastroputra(2008:40) menyatakan bahwa “partisipasi adalah keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”.

Menurut Aprillia Theresia partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Britha Mikkelsen, mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yaitu :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L., Gillin dan J.P Gillin sepakat bahwa istilah masyarakat adalah adanya saling bergaul dan interaksi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat

tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identifikasi bersama.

Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati.

Britha Mikkelesen, Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1999). Produk yang dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Beberapa ahli yang lain juga memberikan definisi masyarakat yaitu :

- a. Ralph Linton mengatakan Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- b. Mac Iver dan Page mengatakan bahwa Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.
- c. Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan pengertian tentang masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Berkaitan dengan partisipasi

dalam pemberdayaan masyarakat, Bintoro Tjokoromidjojo menjelaskan bahwa:

- a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Ini bisa berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dari pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah atau golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Kita bisa melihat bahwa segala perkara dunia dalam suatu pembangunan maupun urusan lainnya hendaklah dimusyawarahkan begitu halnya perencanaan pembangunan yang ada di Desa Kaligading hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum hendak mengambil keputusan agar apa yang direncanakan bisa dijalankan dengan baik dan nantinya tidak akan ada kesalahfahaman satu dengan yang lainnya. Dapat penulis simpulkan partisipasi masyarakat adalah Suatu tindakan keikutsertaan masyarakat didalam kegiatan pembangunan desa untuk terlaksananya pembanguann desa yang efektif dilakukan dengan musyawarah agar sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

Menurut Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat

- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat

3. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, menurut Wilcox mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- a. Memberikan informasi (*information*);
- b. Konsultasi (*consultion*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memmberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang diperlukan guna pengambilan keputusan;
- d. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan;
- e. Memberikan dukungan (*supporting independet community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah rencana pembangunan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, keterlibatan masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada

kepentingan masyarakat terutama oleh para cendekiawan akhir-akhir ini dikemukakan perlunya diberikan perhatian terhadap aspek dan pemerataan pembangunan.

Metode partisipasi ini merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpulan data dan responden. Pertanyaan-pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya jawab dengan responden. Terdapat banyak teknik pengumpulan data partisipasi. Terdapat 4 (empat) diantaranya:

- a. Penelitian dan Aksi partisipasi (*Participatory Research and Action*). Metode ini biasanya menggunakan teknik-teknik visual (tanaman, biji-bijian, tongkat) sebagai alat petunjuk pendataan sehingga memudahkan masyarakat biasa (bahkan yang buta huruf) berpartisipasi.
- b. *Stakeholder Analysis*. Analisis terhadap para peserta atau pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau organisasi sosial tertentu mengenai isu-isu yang terjadi di lingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan terutama untuk menentukan apa masalah dan kebutuhan suatu organisasi, kelompok, atau masyarakat setempat.
- c. *Beneficiary Assessment*. Pengidentifikasi masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan sosial. Tujuan utama pendekatan adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan partisipasi, merancang inisiatif-inisiatif pembangunan, dan menerima masukan-masukan guna memperbaharui sistem dan kualitas pelayanan dan kegiatan pembangunan.
- d. Monitoring dan Evaluasi Partisipasi (*Participatory monitoring and Evaluation*). Metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi.

b) Gotong-royong

Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Kerjasama saling membantu atau bergotong royong dalam masyarakat demi kepentingan bersama sudah terlaksana sejak jaman dahulu kala, karena dengan bergotong royong kegiatan menjadi lancar dalam mencapai tujuannya. Gotong royong dapat dimaknai sebagai saling tolong menolong untuk mengerjakan sesuatu, khususnya sesuatu yang bermakna sosial. Lebih jauh lagi, gotong royong ini didasari oleh semangat kekeluargaan, sukarela dan tanpa pamrih.

Abdillah (2006, h. 4) mengemukakan "Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan". Gotong royong merupakan salah satu aktivitas sosial yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Kegiatan gotong royong secara sederhana mempunyai arti kerja sama secara suka rela antar individu dan antar kelompok yang membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.

Gotong royong yang telah menjadi salah satu budaya dalam diri warga desa Kaligading dan telah menjadi jati diri warga tentunya sangat sesuai bila menjadi suatu sistem. Gotong royong terbukti dapat menciptakan dan menjaga kerukunan dalam kehidupan warga. Melalui kegiatan gotong royong warga melakukan interaksi positif sehingga menguatkan rasa kerjasama dan persaudaraan di dalam diri warga. Sehingga antar berbagai macam agama tersebut dapat tercipta suatu hubungan yang harmonis dan penuh kerukunan.

Mengacu pada teori yang dijelaskan oleh Talcott Parsons tentang teori sistem yang ada didalam masyarakat yaitu terdapat tiga sistem. Sistem yang pertama yaitu sistem sosial. Pada sistem sosial, manusia satu dengan manusia yang lain melakukan

interaksi. Interaksi ini terjadi secara berulang-ulang. Interaksi yang terjadi seringkali membawa konflik karena orang memperjuangkan tujuan yang berbeda-beda (Sutrisno mudji dan hendar putranto, 2005:56). Jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat desa Kaligading yang masyarakatnya terdiri dari warga yang berbeda agama, gotong royong sebagai sistem sosial ini sangat sesuai. Warga saling melakukan interaksi, dimana didalam interaksi yang dilakukan ini memungkinkan terjadinya suatu perselisihan. Sehingga di butuhkan suatu sistem untuk mengendalikannya.

Gotong royong sebagai sistem sosial ini dapat menjadi pengendalin dari adanya interaksi yang terjadi diantara warga. Ketika melaksanakan kegiatan gotong royong di desa, warga akan saling melakukan kerjasama dalam kegiatan gotong royong. Sehingga interaksi yang terjadi diantara warga juga merupakan interaksi yang bersifat positif. Jika interaksi yang terjadi merupakan interaksi yang positif yaitu interaksi dalam bentuk kerjasama maka hubungan antara warga juga dapat mengarahkan ke kehidupan warga yang stabil. Dengan demikian gotong royong sebagai sistem sosial pun sesuai.

Sistem yang kedua yaitu sistem kepribadian. Dalam sistem kepribadian, individu hidup untuk memenuhi hasrat dan keinginannya. Masyarakat akan dibentuk sesuai dengan sistem yang berlaku di masyarakat (Sutrisno mudji dan hendar putranto, 2005:57). Di Desa Kaligading, masyarakatnya terdiri dari warga yang majemuk. Bahkan dalam satu rumah pun, terdapat beberapa orang yang memiliki agama yang berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut maka setiap orangnya tentu memiliki keinginan dan tujuan yang berbeda-beda yang ingin dipenuhi. Namun meskipun memiliki perbedaan tersebut, dalam diri warga desa balun dari dulu hingga sekarang dengan kehidupan yang majemuk tentu memiliki satu keinginan yang sama yaitu hidup rukun, saling menghargai dan bekerjasama dalam kehidupannya.

Salah satu kegiatan yang dapat menanamkan dan menjaga kerjasama dalam diri warga yaitu gotong royong yang memiliki unsur kerjasama yang sangat kuat. Hal ini sesuai dengan sistem kepribadian dari teori sistem kedua yang di kemukakan oleh Talcott Parsons dimana dalam kehidupan majemuk, warga desa Kaligading

menginginkan kehidupan yang rukun dan saling bekerjasama yang dapat di bentuk melalui adanya suatu sistem yaitu gotong royong. Dengan demikian gotong royong dapat menjadi sistem kepribadian dalam diri warga desa Kaligading untuk mencapai keinginan setiap warganya yaitu untuk hidup rukun, saling menghargai dan bekerjasama.

Sistem ketiga dari teori sistem Talcot Parson yaitu sistem budaya. Dalam sistem budaya ini membuat orang saling berkomunikasi dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka. Gotong royong sebagai salah satu budaya yang telah ada sejak dulu termasuk di desa Kaligading dapat menjadikan warganya untuk saling mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan tindakannya. Melalui kegiatan gotong royong di desa Kaligading yang terbagi dalam beberapa bidang yaitu ekonomi dan sosial yang masing-masing terbagi pula dalam setiap lingkup rukun tetangga, rukun warga dan desa.

Dari definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan gotong royong merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama berawal dari hubungan sosial antara individu yang terjalin dalam masyarakat, karena dalam teori spesies manusia merupakan komponen utama dalam masyarakat, dengan tanpa mengenal status sosial, bersifat suka rela sehingga gotong royong dapat dilakukan serta dapat berjalan lancar untuk mencapai suatu hasil yang diidamkan bersama.

c) Pembangunan

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat.

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu

struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro,2000). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Pengertian pembangunan seperti yang telah di uraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang di miliki. Semua itu dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan Rohani maupun Jasmani. Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti yang lebih buruk menjadi baik bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Selain dilihat sebagai upaya memperbaiki keadaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk mengetahui segala potensi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat dimana pembangunan berusaha menggerakkan dan menguakkan potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan sistem nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat.

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pada hakikatnya pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah

pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan Negara yang lain.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatannya yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan). Sedangkan menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Fakhri mendefinisikan pembangunan yang dikaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, gerak menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.

Menurut Siagian pembangunan adalah Suatu usaha atau rangkaian usaha pertrumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

2. Strategi Pembangunan

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Masril Karim, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal melalui program-program pembangunan pedesaan tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah:

- a) pembangunan pertanian (*agricultural development*)
- b) industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)
- c) pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*)
- d) strategi pusat pertumbuhan (*growth centre strategy*)

Uraian berikut berusaha membahas secara ringkas asumsi-asumsi dasar, sasaran dan bagaimana pelaksanaan program-program tersebut, serta beberapa hambatan ketika diimplementasikan.

a. Pembangunan pertanian (*agricultural development*)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan pangan (baik dipedesaan maupun dipertanian), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh negara maju.

Implementasi program pembangunan pertanian ini telah merombak sistem pertanian dan model usaha tani. Karena itu, lahir sebutan *green revolution* (revolusi hijau). Di Indonesia, seperti telah diutarakan dalam uraian terdahulu, program pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah Orde Baru secara intensif pada desa Kaligading telah membuahkan hasil yang spektakuler. Indonesia yang semula tergolong pengimpor beras nomor satu didunia menjadi negara berswasembada pangan.

Tujuan utama program industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*) adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dipedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja. Prospek program ini diyakini cukup cerah antara lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan tidaklah terlalu sukar sehingga mudah mengajak anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif,

- b) kebutuhan investasinya terjangkau oleh sebagian besar anggota masyarakat desa sehingga bisa merata kesegenap lapisan masyarakat,
- c) bahan baku produksi dapat ditekan,
- d) dapat dikerjakan secara komplementer dengan kegiatan produksi lainnya (sambil bertani).

Program ini dalam implementasinya menjumpai beberapa hambatan sehingga sukar mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan tersebut antara lain terletak pada nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat desa sendiri. Anggota masyarakat desa terkesan kurang siap menyongsong industrialisasi. Mereka pada umumnya mudah merasa puas dengan hasil produksi yang pernah dicapai. Mereka juga kurang berani mengambil resiko, dan oleh karenanya sulit didorong untuk melakukan reinvestasi. Keterampilan mereka yang dipergunakan sederhana, kapasitas produksinya terbatas, dan manajemennya pun lemah sehingga sangat sukar meningkatkan kualitas produksinya.

Hambatan lain adalah tiadanya *organic link* antara sektor besar dengan sektor yang lebih kecil. Mereka tampak berjalan sendiri-sendiri, saling berkompetensi, dan sukar melembagakan kerjasama dalam meningkatkan proses produksi, introduksi teknologi baru maupun dalam memasarkan hasil produksi. Malah ketika para pemilik modal menanamkan investasinya didesa, yang berkembang kemudian bukanlah industri pedesaan tetapi industri kapital intensif yang berada dalam setting desa. Industri semacam ini tidak menciptakan banyak kesempatan kerja, terutama karena anggota masyarakat desa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan karena sumber daya mereka lemah.

b. Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu (*Integrated Development*)

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Menurut Waterston, ada enam elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan semacam ini, yaitu: (a) pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya (*labour intensive*), (b) memperluas kesempatan kerja, (c)

intensifikasi tenaga kerja skala kecil, dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan, (d) mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (e) mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan, dan (f) membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek multi sector.

Prinsip-prinsip serupa juga pernah dilontarkan oleh “Rehovot School” dalam mendekati pembangunan masyarakat desa terpadu, yang antara lain mencakup:

a) Pertumbuhan pertanian sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan pedesaan, (meliputi: diversifikasi usaha tani, keluarga tani sebagai unit organisasi, perkembangan simultan sistem penyangganya, organisasi oleh dan untuk petani, sert industrialisasi pedesaan),

b) Urbanisasi sebagai faktor promosi bagi pembangunan pedesaan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini lebih menekankan transformasi sektor pertanian sebagai *the prime mover*. Transformasi tersebut adalah perubahan secara gradual (tetapi pasti) dari pertanian *subsistence* menjadi pertanian *komersial*. Pendekatan ini juga menganjurkan adanya fungsi atau gabungan dari strategi *top-down* dan strategi *bottom-up*. Strategi *top-down* dianggap terlalu banyak diwarnai oleh pemaksaan, sementara strategi *bottom-up* dianggap terlalu percaya pada kekuatan lokal dan mengingkari kelemahan yang terdapat ditingkat bawah. Itulah sebabnya penggabungan dua macam strategi tersebut diyakini akan banyak mendatangkan kesejahteraan bagi segenap anggota masyarakat.

c. Strategi Pusat Pertumbuhan (*growth centre strategy*)

Salah satu elemen yang terabaikan dalam program-program pembangunan pedesaan yang telah didiskusikan (terutama program pembanguann masyarakat desa terpadu) adalah ruang (*space*). Program-program tersebut lebih memberi tekanan pada perencanaan dan implementasi proyek saja, dan kurang memperhatikan keterkaitan letak proyek tersebut dengan ruang pengembangan ekonomi yang lebih

luas, terutama dengan letak atau posisi kota. Itulah sebabnya berbagai macam infrastruktur dan fasilitas terkesan dibangun hanya untuk kepentingan.

Proyek itu sendiri, tanpa memperhatikan jarak ideal dengan kota dalam fungsinya sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produk. Strategi pusat pertumbuhan adalah sebuah alternatif yang diharapkan memecahkan masalah ini. Cara yang ditempuh adalah membangun atau megembangkan sebuah pasar didekat desa. Pasar ini fungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen, atau lazim disebut dengan "*the centres of demonstration effect of customer goods*". Informasi semacam itu besar sekali maknanya bagi pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi gamblang dalam mengembangkan usaha.

Pusat pertumbuhan semacam itu diupayakan agar dikembangkan sedemikian rupa sehingga secara sosial tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ini disamping secara langsung dapat menjawab berbagai persoalan pemasaran atau distribusi hasil produksi pertanian, juga dapat dikelola sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa. Pengelolaan semacam ini akan mengurangi ketergantungan dan sangat dibutuhkan bagi pengembangan kewiraswastan. Pusat pertumbuhan itu akan melahirkan sebuah komunitas desa kota (urban), yang ditandai dengan kemauan untuk menerima prinsip-prinsip ekonomi uang namun tetap tidak kehilangan nilai-nilai juga sesuai dengan iklim usaha masyarakat desa. Pusat pertumbuhan itu juga tidak terlalu besar, sehingga setiap perkembangan yang mengarah pada lahirnya monopoli oleh kelompok ekonomi kuat dapat segera dikontrol dan dihindari. Banyak pengamat melihat bahwa strategi pusat pertumbuhan ternyata juga kurang begitu berhasil meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Konsep pusat pertumbuhan ternyata tidak melahirkan pemukiman baru dengan komunitas berkarakter yang dibayangkan masih mempertahankan nilai-nilai desa tetapi mau menerima nilai-nilai kota. Yang justru tumbuh adalah sebuah

reartikulasi pola pemikiran desa, yang dihuni oleh orang dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang hadir bersama dengan program tersebut.

3. Sasaran Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Sasaran umum yang diharapkan dapat dicapai adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya pertanian (*agricultural resource based*) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran khusus sebagai berikut :

- a. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar seluruh wilayah.
- b. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisien yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- c. Tercapainya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.
- d. Konsep Perencanaan Pembangunan dari Bawah (*Bottom Up Planning*)

Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari keterlibatan peran serta Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi harus dipandang pula sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan pedesaan harus diletakkan dalam konteks: (1) sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) sebagai upaya mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan kokoh.

Rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumber daya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. Karena dana atau anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembanguann yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan : (1) penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan proritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur, dan (2) didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut bottom up planning. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) secara nyata dan terarah.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan didaerah tersebut.

Bentuk partisipasi masyarakat tersebut antara lain, mereka bersedia menyerahkan sebagai lahan/tanahnya yang dilewati oleh pembangunan jalan desa atau jaringan irigasi, tanpa meminta pembayaran ganti rugi harga lahan/tanah tersebut, kerja bersama-sama dalam pembangunan jalan desa (tanpa diberikan upah), dan lainnya

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data adalah subyek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Suharsimi, 2006;192). Berdasarkan sumbernya data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud yaitu sumber wawancara dan pengamatan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian di Desa Kaligading. Peneliti melakukan wawancara serta pengamatan secara langsung yang diperoleh dari narasumber.

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun oleh peneliti. Narasumber peneliti ditentukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan penelitian.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu sumber dokumentar yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Selain sumber yang telah ada peneliti juga mengumpulkan data yang sifatnya mendukung seperti literatur dan bacaan yang sesuai dengan membangun kemandirian desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penulis, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

Teknik fenomena pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga merekam yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penulis melakukan observasi secara aktif guna mendapatkan data yang valid untuk dapat dianalisis dan di data.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016:231). Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti perangkat desa. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara resmi terstruktur agar keluwesan dan keleluasaan dalam mencari data tetap terjaga.

Dalam hal ini penulis wawancara dengan :

1. Pak Rofi'i (kepala desa), pada tanggal 28-Maret-2022 di kantor kepala desa Kaligading, sehingga penulis mengetahui tentang kepemimpinan kepala desa dalam bertanggung jawab atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Pak Sahri (anggota BPD), pada tanggal 28-Maret-2022, untuk mengetahui pembangunan-pembangunan apa yang sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Kaligading.
3. Mas Fandi (karang taruna), pada tanggal 29-Maret-2022
4. Pak Purnomo (ketua Rt.03), pada tanggal 29-Maret-2022
5. Pak Chamdani (kepala wilayah 1), pada tanggal 29-Maret-2022, untuk mengetahui lebih jelas mengenai Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Infrastruktur di Desa Kaligading. Wawancara akan digunakan sebagai bagian dari menelusuri data-data yang berasal dari narasumber-narasumber kunci yang dilakukan secara mendalam.
6. Ibu Jumiyah Rofi'i (ketua PKK), pada tanggal 30-Maret-2022

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:240). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih bisa dipercaya apabila didukung oleh sejarah di wilayah penelitian. Hasil penelitian juga akan semakin bisa dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis yang telah ada (Sugiyono, 2014:240). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih bisa dipercaya apabila didukung oleh sejarah di wilayah penelitian. Hasil penelitian juga akan semakin bisa dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis yang telah ada (Sugiyono, 2016:240).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara seorang penulis dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat dipergunakan begitu saja, analisis data menjadi bagian amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah. Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini setidaknya melalui tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016:252). Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memilah data, memusatkan perhatian dan penyederhanaan data, abstraksi dan transformasi data-data yang muncul dilapangan terkait dengan peran masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Tahap berikutnya dari analisis data adalah penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tertentu; naratif, deskriptif, matrik, bagan, jaringan, tabel, dan sebagainya sehingga lebih mudah melihat apa yang

terjadi di lapangan dan lebih memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data ini termasuk juga kegiatan memasukkan data-data yang dianggap relevan ke dalam bab-bab pembahasan. Penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah semua tahap di atas dilalui, namun penarikan kesimpulan-kesimpulan kecil terjadi secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung sampai mendapatkan suatu kesimpulan akhir yang kokoh dari keseluruhan data yang telah direduksi dan disistematisasikan.

Analisis data yang digunakan penulis lebih melakukan fokus pada wawancara dengan informasi kunci tentang bagaimana gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Kaligading, bagaimana program-program kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data dengan teori-teori politik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang partisipasi masyarakat untuk menjadikan penelitian lebih kuat dan dapat dipercaya baik dari segi akademik maupun empirik. Data-data yang didapat dari penelitian juga sangat membantu dalam perkembangan analisis yang akan menjadi rujukan untuk hasil penelitian dengan menggunakan analisis partisipasi masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagian awal skripsi merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, maupun daftar gambar.
2. Bagian Pokok Skripsi yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, pada bagian ini berisi uraian tentang (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) tinjauan pustaka, (6) metode penelitian.

Bab II Landasan teori, dan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini.

Bab III Lanskap tempat penelitian, pada bagian ini menjelaskan kondisi geografis dan kondisi sosial budaya, ekonomi tempat penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, pada bagian ini berisi tentang pembahasan atas rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses gotong royong di Desa Kaligading dan Bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian serta berisikan saran dari penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran. Daftar Pustaka, pada bagian ini memuat seluruh sumber kepustakaan yang berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam hal kegiatan pembangunan desa yang bersifat murni dari masyarakat, makasempuhnya ditentukan oleh masyarakat itu melalui musyawarah yang nantinya gagasan tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Tolak ukur partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (rencana) ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dan gagasan, ide, serta pendapat masyarakat tiap melaksanakan rapat.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2011:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karangtaruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Bila dilihat dari bentuk dan tahapan partisipasi, maka tahapan partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Hoofsteede (1971: 25), dalam hal ini membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, antara lain :

- a. Partisipasi inisiasi (*Inisiation Participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota

masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.

- b. Partisipasi Legitimasi (*Legitimation Participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- c. Partisipasi Eksekusi (*Execution Participation*), adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Dari ketiga tahapan partisipasi di atas, partisipasi inisiasi mempunyai kadar yang lebih tinggi dibanding partisipasi legitimasi dan eksekusi. Di sini penduduk tidak hanya sekadar menjadi objek pembangunan saja, tetapi sudah dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan.

Sedangkan kalau masyarakat ikut hanya dalam tahapan pembicaraan saja, seperti “rembug desa”, padahal proyek yang akan dibangun sudah jelas wujudnya, maka masyarakat hanya berpartisipasi pada tingkat legitimasi saja. Sedangkan Partisipasi Eksekusi adalah yang terendah dari semua tingkatan partisipasi di atas. Masyarakat hanya turut serta dalam pelaksanaan proyek, tanpa ikut serta menentukan dan membicarakan proyek tersebut. Sedangkan cara menggerakkan partisipasi adalah perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi.

Agar perbaikan kondisi dan peningkatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa tersebut. partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui: a. Proyek pembangunan desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat. b. Organisasi dan lembaga kemasyarakatannya yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. c. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian mereka di Jamaica, Goldsmith dan Blustein berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika: a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. c. Manfaat yang diperoleh melalui

partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat. d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam partisipasi masyarakat berlaku juga prinsip pertukaran dasar (*basic exchange principles*). Salah seorang pemuka teori pertukaran (*exchange theory*) tersebut, Peter M. Blau berpendapat, bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan itu. Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan.

Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut beberapa sumber, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dan perlu dibedakan.

Masyarakat desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri. Rasa tanggung jawab sebagai salah satu kualitas lainnya, masyarakat desa yang berkemampuan berkembang secara mandiri tumbuh tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas, berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan pada hal yang lebih besar, mempunyai keyakinan akan kemampuannya sendiri atau berkesempatan memutuskan sendiri apa yang dikendaki.

B. Macam-macam Partisipasi

Peran serta masyarakat antar satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda dengan sesuai kapasitas dan kemampuan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan. Perbedaan wujud partisipasi ini kemudian akan memunculkan beberapa bentuk partisipasi yang berbeda-beda. Ndraha berpendapat bahwa

partisipasi bentuknya dapat berupa: kontak sosial dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik menerima maupun menolaknya, partisipasi dalam perencanaan dan penetapan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan program pembangunan.

Menurut Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

Dilihat dari jenisnya, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat bermacam-macam sesuai dengan kemampuan, seperti tertera di bawah ini:

- 1) Partisipasi buah pikiran, adalah jenis partisipasi yang diberikan seperti menyumbangkan buah pikiran, pengalaman, pengetahuan dalam pertemuan rapat.
- 2) Partisipasi tenaga, adalah jenis partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan, seperti untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan untuk orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela.
- 3) Partisipasi harta benda, partisipasi yang diberikan oleh seseorang dalam suatu kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- 4) Partisipasi keterampilan dan kemampuan, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.

- 5) Partisipasi sosial, adalah jenis partisipasi yang diberikan sebagai tanda keguyuban, seperti turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian) tabungan dan sebagainya. (Santoso Sastroputro, 1988: 44).

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, akses dan *control* (Juliantara, 2002:90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah :

- 1) *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
- 2) *Access*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
- 3) *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan

terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Dengan demikian dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dirangkum indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

- a) Ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.
- b) Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat.
- c) Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang dan material lainnya.
- d) Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk didalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut.
- e) Dengan istilah lain ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama.
- f) Ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan pembangunan.

Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Kaligading ini, maka dapat ditarik beberapa manfaat atau fungsi yang ditimbulkan oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a) Sebagai masukan, diantaranya:
Dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan, dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut (Mukerji 1961: 5); Johnson dan Clark, 1982: 170), dan dapat membangkitkan rasa percaya diri pada kemampuan sendiri (*self reliance*) masyarakat . (Uma Lele dalam Bryant dan While, 1982:208), serta

berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang lebih besar (Hurlock, 1961:20).

- b) Sebagai keluaran, partisipasi masyarakat dapat digerakkan atau dibangun. Disini partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulus atau motivasi melalui berbagai upaya, seperti Inpres Bantuan Desa, Lomba Desa, UDKP, LPMD, KUD dan lain-lain.

Sedangkan partisipasi dilihat dari tingkatan atau tahapannya, menurut Wilcox mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu: a. Memberikan informasi (*information*) b. Konsultasi (*consultion*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang diperlukan guna pengambilan keputusan d. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan e. Memberikan dukungan (*supporting independet community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan

Metode partisipasi merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpulan data dan responden. Pertanyaan-pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya jawab dengan responden. Terdapat banyak teknik pengumpulan data partisipasi. Terdapat 4 (empat) diantaranya: a. Penelitian dan Aksi partisipasi (*Participatory Research and Action*). Metode ini biasanya menggunakan teknik-teknik visual (tanaman, biji-bijian, tongkat) sebagai alat petunjuk pendataan sehingga memudahkan masyarakat biasa (bahkan yang buta huruf) berpartisipasi. b. *Stakeholder Analysis*. Analisis terhadap para peserta atau pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau organisasi sosial tertentu mengenai isu-isu yang terjadi dilingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan terutama untuk menentukan apa masalah dan kebutuhan suatu organisasi, kelompok, atau masyarakat setempat. c. *Beneficiary Assessment*. Pengidentifikasi

masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan sosial. Tujuan utama pendekatan adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan partisipasi, merancang inisiatif-inisiatif pembangunan, dan menerima masukan-masukan guna memperbaharui sistem dan kualitas pelayanan dan kegiatan pembangunan.

d. *Monitoring dan Evaluasi Partisipasi (Participatory monitoring and Evaluation)*. Metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi.

C. Teori Pembangunan Infrastruktur

Pengertian Pembangunan menurut Rogers dalam Nasution (2007) adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun Tujuan Pembangunan menurut Nasution (2007) terbagi atas 2 bagian :

1. Tujuan Umum Pembangunan adalah suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.
2. Tujuan Khusus Pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

Dalam relevansinya dengan Pembangunan Nasional Dimensi Pembangunan Nasional menurut Swasono, (2005: 22) adalah merupakan suatu Proses dari demokrasi baik secara politik *political democratization*, social maupun ekonomi *economic democratization* untuk mencapai kemajuan *progress*, kebebasan *freedom* serta mengurangi hambatan *elimination of freedom*, di mana proses ini juga merupakan proses dari humanisasi. Di samping itu menumbuhkan pendapatan nasional *growth* melalui penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi bahkan menghapus pengangguran dan kemiskinan.

Pembangunan infrastruktur merupakan strategi dalam penyediaan sarana

yang utama untuk itu seperti yang di ungkapkan dalam infrastruktur Indonesia (kadin Indonesia-jetro, 2006) yaitu prinsip dasar penyediaan infrastruktur secara keseluruhan antara lain :

1. Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.
2. Keterkaitan infrastruktur dengan berbagai aspek. Agar peran infrastruktur dalam pembangunan menjadi optimal, maka keberadaan pembangunan infrastruktur harus terkait.
3. Perencanaan kebutuhan infrastruktur harus dilakukan melalui kombinasi antara perencanaan yang digagas pemerintah pusat dengan yang digagas pemerintah daerah. Seiring dengan diimplementasikannya desentralisasi fiskal dan diberikannya kewenangan yang lebih luas bagi daerah, setiap daerah diharapkan mampu lebih mengembangkan potensi daerahnya. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan di daerah harus didasarkan pada kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya.
4. Keberhasilan kerjasama pemerintah dan swasta memerlukan kondisi yang harus dipenuhi.
5. Penyediaan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.
6. Mekanisme penyediaan infrastruktur harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di daerah tentu harus mendapat perhatian serius, karena faktor terbesar yang dihadapi pembangunan selama ini adalah buruknya kualitas pembangunan infrastruktur khususnya di daerah. Berbagai upaya untuk mengatasi kondisi tersebut

terus dilakukan, salah satunya adalah dengan akselerasi pembangunan infrastruktur daerah guna mengejar ketertinggalan daerah dengan pusat dan daerah yang tertinggal dengan daerah lain. Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum.

Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: "Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program". Namun jika Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan jalan secara keseluruhan maka Pemerintah Pusat akan membantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan (3) PP No. 34 Tahun 2006 yang menyebutkan: (2) "Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan." (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri".

Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan lain sebagainya, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur.

BAB III

LANSKAP DESA KALIGADING

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai lanskap Desa Kaligading yaitu Sejarah Desa Kaligading, keadaan sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di Desa Kaligading.

A. Sejarah Desa Kaligading (Buku Administrasi Desa Kaligading)

Pada jaman dahulu ada dua orang perampok yaitu Batwo dan Worong yang mempunyai banyak pengikut serta disegani masyarakat karena kesaktiannya. Mereka lebih senang hidup dan membuat rumah di tepi sungai. Saat itu orang yang berguru ilmu agama pada Ki Ageng Mataram di bujuk agar meninggalkan agama itu. Dia benci pada orang yang beragama terutama agama Islam.

Suatu ketika ada seorang kakek penjual getuk yang beristirahat dan tertidur di pinggir jalan. Kemudian Batwo dan Worong mengambil semua uang dan dagangan untuk membeli arak serta berfoya-foya, setelah pedagang tadi bangun, terkejut melihat uang dan dagangannya hilang diambil orang. Kemudian pedagang tersebut kembali ke daerahnya di daerah Jogo Loyo (sekarang ikut Demak Bintoro) tepatnya 5 Km dari Masjid Agung Demak.

Suatu hari kakek penjual getuk itu datang lagi dengan membawa dagangan berupa telur ayam. Si kakek beristirahat di tepi sungai kecil, tidak jauh dari tempat beliau beristirahat dulu, ketika dua perampok mengambil uang dan dagangannya. Ketika sang kakek bangun terkejut dagangannya hilang lalu pulang lagi seraya berdoa kepada Allah mohon agar dia bisa bertemu dengan orang yang merampoknya.

Pada hari lain sang kakek datang lagi dengan membawa dagangan berupa singkong bakar. Di tempat itu kakek didatangi tiga gadis cantik yang ingin membeli dagangannya. Setelah membeli singkong bakar ketiga gadis itu pergi tanpa menginjak tanah, sambil berpesan kepada kakek agar berhati-hati karena akan ada bahaya.

Setelah itu kakek sadar, yang membeli bukan seorang manusia tetapi peri. Tidak lama kemudian perampok itu datang disaat kakek itu belum tertidur dan berkata ‘bawa apa kek’? Kakek itu menjawab “bawa ketela dua” dan dua rampok itu berkata kembali dengan agak menghina, “ Haa...ketela besarnya sebesar buaya”. Dengan jawaban yang tegas dan berani kakek itu berkata “Raden Ucapanmu menjadi doa mu”. Mendengar ucapan kakek dua perampok tadi marah karena kakek itu berbicara sambil jalan meninggalkan dua perampok itu.

Dan salah satu dari perampok itu mengejar jalannya sang kakek tadi sambil mengeluarkan tenaga yang ada. Tetapi anehnya tidak dapat mengejar kakek itu dan perampok yang masih tertinggal di hutan terkejut melihat dagangan sang kakek menjadi buaya semua, kemudian buaya tersebut memakan perampok hingga mati.

Akhirnya perampok yang satu dapat mengejar sang kakek sewaktu mau memakan singkong yang di bawanya. Sang kakek akhirnya tertangkap oleh perampok itu dan singkong tadi dibuang ke sungai karena kesal atas perkataan sang kakek. Setelah membuang singkong tadi kesungai perampok itu belum puas seraya memukul sang kakek hingga terpental ke seberang sungai. Sewaktu perampok itu melompat keseberang sungai ingin memukuli sang kakek kembali, tiba-tiba singkong tadi berubah jadi panjang dan keras seperti tulang (gading), dan singkong tadi menusuk dada perampok itu hingga tewas. Spontan kakek itu berkata “ Haa...wong kali kok ono gadinge”. Dan kemudian kakek itu berkata lagi umodipumo besok yen ono rejaning zaman kampung iki tak jenengi “ Kaligading”.

Sekarang kakek merasa aman karena dua musuhnya sudah mati dan beliau bermukim di situ, bertani dan menyebarkan agama Islam sampai wafat dan dimakamkan di tanah kosong di beri tanda dua bambu ampel dan makam itu sudah hilang menjadi serumpun pohon bambu ampel. Kakek itu adalah Syeh Abdul Rohman murid Syeh Ibrohim dan Kyai Kulkum.

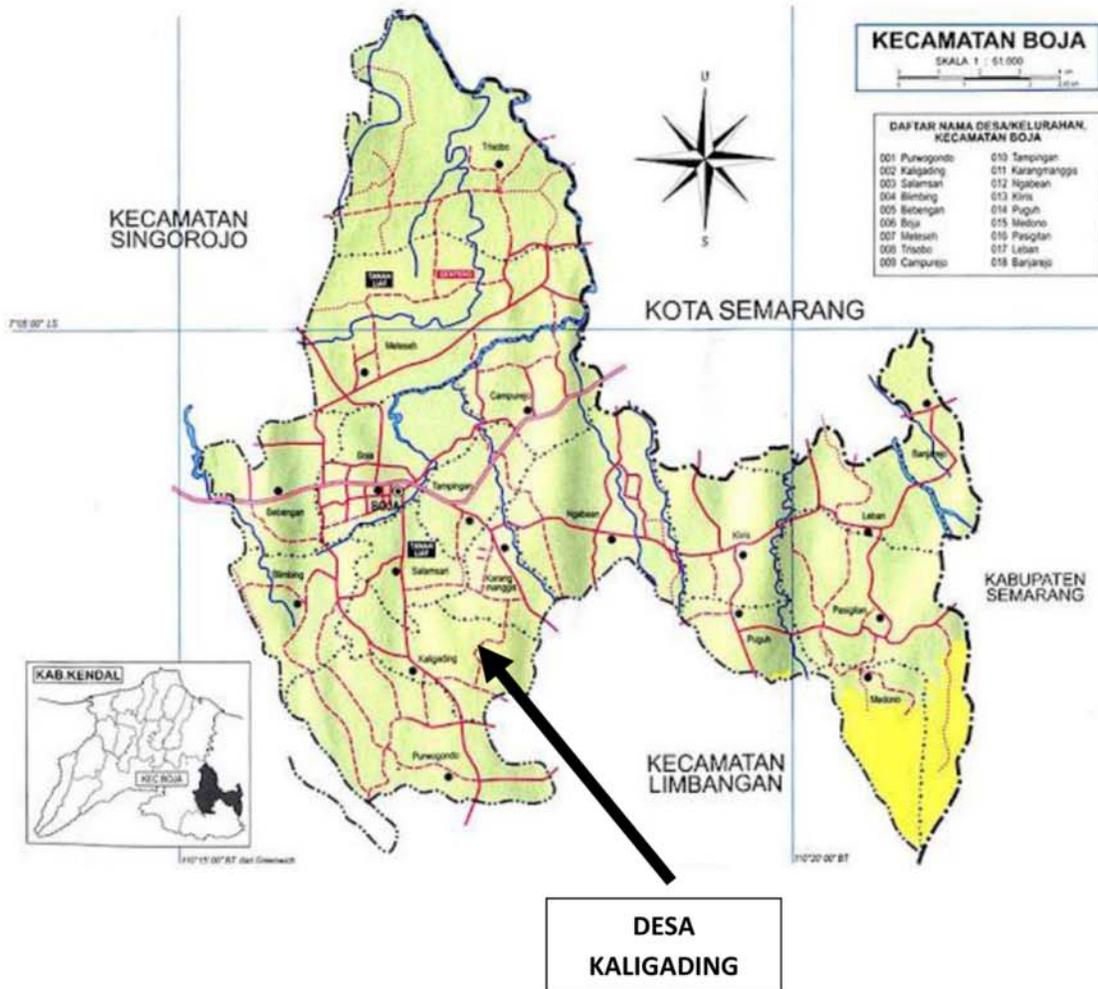
B. Kondisi Geografis

Desa Kaligading merupakan desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Adapun luas wilayah adalah 271,65 ha secara administratif.

Di desa Kaligading sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Desa Kaligading mempunyai batasan-batasan wilayah, batas wilayah sebelah utara adalah Desa Salamsari, batas selatan Desa Purwogondo, dan sebelah barat Desa Blimbing sedangkan sebelah timur Desa Taman Rejo. Desa Kaligading terbagi atas 6 Dusun yaitu : Krajan, Masiran, Sidawung, Blorong, Setro, Mlandang.

Gambar 1
Tata Ruang Wilayah Desa Kaligading

Gambar 1
Tata Ruang Wilayah Desa Kaligading



Dari segi demografi, jumlah penduduk di Desa Kaligading berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.556 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.261 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.295 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase Dari Total Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	2.261	49,63 %
2	Perempuan	2.295	50,37 %
Jumlah		4.556	100,00 %

Agar dapat mendeskripsikan lebih tangkap informasi keadaan kependudukan di Desa Kaligading dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klarifikasi usia dan jenis kelamin, sehingga akan diperoleh gambaran tentang Kependudukan Desa Kaligading yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Kaligading berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Desa Kaligading

NO	USIA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	0 – 4	156	3,42	135	2,96	291	6,39
2	5 – 9	183	4,02	195	4,28	378	8,03
3	10 – 14	185	4,06	169	3,71	354	7,77
4	15 – 19	162	3,56	171	3,75	333	7,31
5	20 – 24	177	3,88	196	4,30	373	8,19
6	25 – 29	187	4,10	187	4,10	374	8,21
7	30 – 34	197	4,32	174	3,82	371	8,14
8	35 – 39	159	3,49	181	3,97	340	7,46
9	40 – 44	180	3,95	175	3,84	355	7,79
10	45 – 49	143	3,14	173	3,80	316	6,94
11	50 – 54	142	3,12	135	2,96	277	6,08
12	55 – 59	117	2,57	151	3,31	268	5,88
13	60 – 64	114	2,50	90	1,98	204	4,48
14	65 – 69	63	1,38	72	1,58	135	2,96
15	70 – 74	42	0,92	42	0,92	84	1,84
16	>= 75	54	1,19	49	1,08	103	2,26
JUMLAH		2.261	49,63	2.295	50,37	4.556	100,00

- a) Jumlah Penduduk : 4.556 jiwa
- b) Jumlah Laki-laki : 2.261 jiwa
- c) Jumlah Perempuan : 2.295 jiwa
- d) Jumlah Kepala Keluarga : 1.560 KK

Desa Kaligading termasuk daratan tinggi yang mana curah hujan sekitar 309 mm/m dengan ketinggian tanah 10 meter dari permukaan dasar laut. Suhu rata-ratanya 29 °C dengan dua perubahan musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, maka dari itu Desa Kaligading sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Mata pencaharian atau pekerjaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada setiap orang untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Masyarakat Desa Kaligading merupakan masyarakat

yang majemuk dimana masyarakatnya memiliki jenis pekerjaan yang beraneka ragam.

Pendidikan Menurut Prof. H. Mahmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Selain dari itu Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dan pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Haryanto, 2012)

Masyarakat Desa Kaligading, apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya yang sudah mengimplementasikan wajib belajar 9 tahun yang merupakan kewajiban yang dirancang oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari data di bawah ini yang menunjukkan 33,91% lebih masyarakat Desa Kaligading sudah melaksanakan kewajiban belajar 9 tahun. Di bawah ini data yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Kaligading.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa
Kaligading

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	Tidak/Belum Sekolah	621	13,63	633	13,89	1.254	27,52
2	Belum Tamat SD	129	2,83	136	2,99	265	5,82
3	Tamat SD	630	13,83	656	14,40	1.286	28,23
4	SLTP/ Sederajat	368	8,08	388	8,52	756	16,59
5	SLTA/ Sederajat	423	9,28	366	8,03	789	17,32
6	Diploma I/II	5	0,11	5	0,11	10	0,22
7	Akademi/Diploma III	25	0,55	29	0,64	54	1,19
8	Diploma IV/ S1	56	1,23	79	1,73	135	2,96
9	S2	3	0,07	3	0,07	6	0,14
10	S3	1	0,02	0	0,00	1	0,02
JUMLAH		2.261	49,63	2.295	50,37	4.556	100,00

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa Di Desa Kaligading kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 16.59% dan pendidikan SMP dan SMA/SMK 17.32%. Sedangkan yang berpendidikan sampai perguruan tinggi hanya 2.92%. Masyarakat Desa Kaligading kebanyakan adalah lulusan SMP, SMA/SMK dan mereka akan memutuskan untuk kebanyakan dari mereka bekerja sebagai karyawan swasta, Petani/pekebun, buruh pabrik, Pegawai Negeri Sipil.

a. Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai.

Sebagian besar masyarakat Desa Kaligading termasuk kategori sebagian besar menganut agama Islam karena secara kultural pegangan ini didapat dari

hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental diantara masyarakat. Selain itu perkembangan agama juga berkembang berdasarkan keturunan dari nenek moyang ke orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah yang membuat agama Islam mendominasi agama di seluruh Desa Kaligading.

Tabel 4
Jumlah Penduduk yang Menganut Agama atau Kepercayaan di Desa Kaligading

NO	AGAMA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	Islam	2.206	4842	2.235	49,06	4.441	97,48
2	Kristen	39	0,86	41	0,90	80	1,76
3	Katholik	16	0,35	19	0,42	35	0,77
4	Hindu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Budha	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Konghuchu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH		2.261	49,63	2.295	50,37	4.556	100,00

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Kaligading yang memeluk agama Islam dengan jumlah 97,48% dari total jumlah penduduk. Penganut agama Kristen berjumlah 1,76%, penganut agama Katolik berjumlah 0,77%, penganut agama Budha, Hindu, Konghucu dan Kepercayaan berjumlah 0%. Agama Islam sebagai agama yang paling banyak di peluk warga Desa Kaligading. Ada beberapa penganut agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu dan Kepercayaan bertempat tinggal di wilayah Desa Kaligading. Meskipun begitu perbedaan agama tidak menghalangi masyarakat Desa Kaligading untuk saling menghormati dan bekerjasama.

C. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

Desa Kaligading merupakan daerah pedesaan yang masih asri dan alami, karena masih dipelihara keasliannya hingga sekarang. Organisasi sosial yang terdapat do Desa Kaligading antara lain yaitu : Karang Taruna, PKK, LKMD. Organisasi tersebut sudah berjalan dengan baik.Hal ini di sebabkan selain karena adanya motivasi dan dukungan dari masyarakat, juga karena adanya perhatian dari aparat pemerintah desa untuk menggiatkan organisasi sosial tersebut. Seperti yang di ungkapkan saudara Fandi selaku ketua LKMD sebagai berikut:



Wawancara Bersama Saudara Fandi selaku Anggota IRMAS Desa Kaligading 29 Maret 2022

“kalau dari Desa pasti di rangkul untuk selalu mengikuti musyawarah sampai pembangunan, jadi kita para pemuda juga ikut langsung dalam mengambil keputusan dan musyawarah kegiatan lainnya, karena pemuda juga berperan untuk mensukseskan UMKM dengan ada strategi marketingnya jadi pemuda dan ibu-ibu PKK melakukan marketing dalam sosialisasi dan komunikasi lewat media sosial”. (Wawancara Saudara Fandi, 29 Maret 2022)

Di Desa Kaligading sebagian besar masih memegang teguh adat istiadat setempat. Masyarakat Desa Kligading mempunyai adat istiadat sebagai berikut :

a) Nyadran

Setiap menjelang Ramadhan, tepatnya pada bulan Sya’ban, masyarakat Desa Kaligading, selalu melakukan tradisi Nyadran. Budaya yang telah dilestarikan

selama setiap tahunnya, dilakukan dengan bersih-bersih makam para orang tua atau leluhur, membuat dan membagikan makanan tradisional, serta berdoa atau salamatan bersama di sekitar area makam. Dalam kalender Jawa, Bulan Ramadhan disebut dengan Bulan Ruwah, sehingga Nyadran juga dikenal sebagai acara Ruwah. Dirangkum dari berbagai sumber, tradisi ini adalah hasil akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Kata Nyadran berasal dari kata 'Sradha' yang bermakna keyakinan. Nyadran menjadi bagian penting bagi masyarakat Jawa. Sebab, para pewaris tradisi ini menjadikan Nyadran sebagai momentum untuk menghormati para leluhur dan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Biasanya, Nyadran diadakan satu bulan sebelum dimulainya puasa, atau pada 15, 20, dan 23 Ruwah.

Adapun tradisi budaya keagamaan yang selalu di pertahankan oleh masyarakat Desa Kaligading sejak dulu hingga sekarang yaitu tradisi budaya Yasin, Tahlil yang dilakukan setiap malam jum'at yang dilakukan mulai dari kelompok ibu-ibu bapak-bapak dan RT, jamaah Yasin dan Tahlil tersebut masih dilakukan. Selain kegiatan tersebut, Desa Kaligading juga terdapat kegiatan akhirussanah TPQ karena kegiatan tersebut dilakukan untuk memahami agama sebagai suatu kebutuhan dan ajaran dan harus di pelajari harus melalui pembelajaran untuk mengenali agama itu sendiri. Karena salah satu kebanggan orang tua adalah disaat putra-putri mereka berhasil selain dalam hal prestasi sekolah, penguasaan ilmu agama juga menjadi suatu hal yang penting. Dan menyambut tahun baru Islam (Muharram), tahun baru Islam yang disebut dengan tahun baru Hijriah adalah merupakan suatu hari yang penting bago umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi.

Adapun tradisi budaya keagamaan yaitu tradisi budaya selamatan orang meninggal dari ketiga hari, tujuh hari kemudian sampai 40 hari dan seterusnya hingga dilakukann haul setiap tahunnya yaitu budaya masyarakat yang dikerjakan oleh laki-laki jika ada tetangga yang meninggal sudah hari ke 3 maka dibacakan kalimat tayyibah, dan dilakukan setelah sholat isya'. Berdasarkan data

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Kaligading mayoritas beragama Islam.

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kaligading dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : Petani, Buruh tani, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang dan peternak. Berdasarkan data tersebut di Desa Kaligading jumlah yang mempunyai mata pencaharian ada 32,22%. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian atau butuh tani dan wiraswasta atau pedagang ada 17.04% jiwa dari total jumlah penduduk. Jumlah ini terdiri dari petani sebanyak 20.22%, peternak 0.70% dan guru 8.32%.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Kaligading

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase Dari Total Jumlah Penduduk
1	Karyawan	627	4,53 %
2	Wiraswasta/Pedagang	2.357	17,04%
3	Petani	2.798	20,22%
4	Tukang	15	0,10%
5	Pekerja Seni	65	0,46%
6	Guru	1.152	8,32%
7	Pensiunan	80	0,57%
8	Peternak	97	0,70%
9	Pengrajin	126	0,91%
10	Lainnya/Tidak Tetap	1.735	12,54%
11	Tidak bekerja/ Pengangguran	4.779	34,55%
Jumlah		13.831	100,00 %

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kaligading berprofesi sebagai Petani dan karyawan. Menurut peneliti setelah dilakukannya observasi kesuburan tanah dan lahan yang kosong cocok untuk menanam bahan pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian. Selain di sektor pertanian masyarakat Desa Kaligading memiliki

alternatif pekerjaan, karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

D. Infrastruktur Desa Kaligading

Sarana infrastruktur sering diartikan bangunan fisik untuk kesejahteraan umum seperti pendidikan, peribadatan, kesehatan dan jalan. Sarana memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi bahkan sosial politik. Adapun sarana infrastruktur yang dimiliki Desa Kaligading yaitu :

Pertama, sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Di Desa Kaligading terdapat 6 sekolah TK/PAUD, 3 sekolah SD/MI, 1 sekolah SLTP/SMP, dan 8 sekolah TPQ. Semua sarana pendidikan letaknya strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat Desa Kaligading.

Kedua, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Mayoritas masyarakat Desa Kaligading adalah agama Islam. Berikut tabel sarana infrastruktur tempat beribadah Desa Kaligading:

Tabel 6
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Kaligading

	Sarana Ibadah	Jumlah
	Masjid / Mushola	7 – 13
	Gereja	1
B	Pura	0
	Vihara	0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui fasilitas agama yang paling banyak dibangun di Desa Kaligading dikarenakan masyarakat Desa Kaligading mayoritas adalah penduduknya agama Islam. Dimana sarana ibadah di Desa Kaligading juga ada

banyak sekali. Sehingga memudahkan masyarakat Desa Kaligading untuk melaksanakan ibadah.

Ketiga, sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk upaya kesehatan. Sarana kesehatan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Sarana kesehatan di Desa Kaligading ada 7 yaitu berada di dalam kegiatan Posyandu. Masyarakat Kaligading sangat terbantu dengan adanya posyandu tersebut terutama bagi ibu-ibu hamil dan balita karena setiap sebulan sekali mereka membutuhkan pemeriksaan kesehatan seperti imunisasi, suntuk KB, dan pemeriksaan umum.

Saat ini banyak program pembangunan desa yang berusaha untuk memberantas kemiskinan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, diperlukannya pemberdayaan yang ditunjuk pada masyarakat agar mereka lebih mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang semakin tidak terkendali setiap harinya. Sangat banyak faktor yang melatarbelakangi adanya pemberdayaan, hal ini didasari oleh kemiskinan yang menimbulkan permasalahan yang beragam baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Berawal dari sinilah munculnya berbagai program yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk membangkitkan dan mendorong kemampuan masyarakat terutama masyarakat yang berada pada wilayah desa.

Salah satu program tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Adanya pemberian ADD adalah sebagai bantuan untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat. ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa tersebut berdasarkan demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa membuka jalan untuk memperbaiki kondisi dari infrastruktur yang perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada Desa Kaligading direncanakan pada awal tahun 2007 yang mana sebelum dilakukannya pembangunan aparatur desa meninjau kembali program apa saja yang akan dilakukan ada pembangunan infrastruktur pada tahun tersebut. Aparatur desa melakukan

pembangunan infrastruktur berdasarkan hasil keputusan yang dibuat atau yang di diskusikan sebelum dilakukannya pembangunan infrastruktur oleh pihak internal aparat desa dengan melihat kondisi yang dibutuhkan lapangan.

Dari hasil keputusan yang dibuat pihak internal desa, disepakati ada beberapa program pembangunan infrastruktur pada Desa Kaligading antara lain :

1. Pembuatan Talut Penahan Tanah

Pembuatan Talut penahan tanah dilakukan karena pada lokasi tersebut memiliki tekstur tanah kurang baik yang rentan tergerus oleh air. Jika dibiarkan begitusaja maka akan berdampak pada kondisi jalan yang akan dibuat nantinya. Hal ini dilakukan agar pembuatan jalan yang akan dibuat kondisinya tidak mudah rusak.

2. Pembuatan Rapat Beton (jalan cor)

Pembuatan rapat beton yang dibuat pada lokasi jalan yang masih berupa jalan tanah, yang mana kondisi jalan yang tidak memadai saat dilalui oleh masyarakat dikala musim hujan. Jalan ini merupakan jalan inti mengarah pada pemukiman warga Desa Kaligading.

Yang mana Pembangunan tersebut menghabiskan biaya sebagai berikut:

- a) Pembangunan betonisasi jalan usaha tani di dusun Blorong 2 menghabiskan dana dengan jumlah : 63.975.000
- b) Talut jalan di dusun Blorong : 68.775.000
- c) Irigasi : 40.177.000
- d) Air bersih di dusun Setro: 45.000.000
- e) Pembangunan desa wisata : 24.198.000

E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kaligading

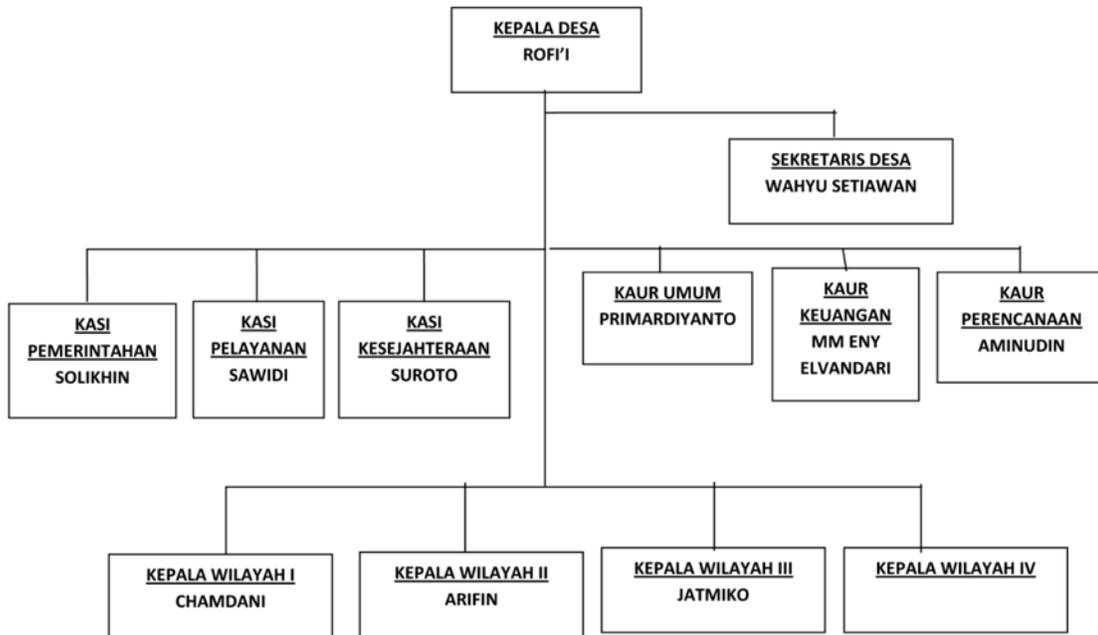
Pemerintahan memiliki peranan penting dalam pembangunan dan memberikan pelayanan berbagai kepentingan umum kepada masyarakat mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, dan kependudukan.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepla Desa dan Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

- a) Kepala Desa : 1 Orang

- b) Perangkat Desa : 4 Orang
 - 1. Sekretaris Desa : 1 Orang
 - 2. Pelaksana Teknis Lapangan : 3 Orang /Kadus
 - 3. Unsur Kewilayahan : 3 Orang /Kadus

**Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kaligading Kecamatan Boja
Kabupaten Kendal**



F. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kaligading

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk melihat bagaimana kegiatan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Kaligading yang meliputi beberapa tahapan kegiatan pembangunan diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kaligading

Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebuah desa. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Rofi'i selaku kepala desa di Desa Kaligading : "Perencanaan dalam pembangunan desa di Desa Kaligading dalam pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya terdapat ADD (Anggaran Dana Desa) yang melibatkan masyarakat desa melalui rapat yang dilaksanakan pada tingkat RT dan RW, dimana masyarakat sering menyebutnya "Musrenbangdes". (Musyawarah Pembangunan Desa).

Hal yang dibahas dalam rapat yang dilakukan di Balai Desa Kaligading meliputi permasalahan di tingkat lingkungan RT dan RW saja, salah satu contohnya adalah adanya betonisasi jalan desa, pembangunan talut, pamsimas, pembangunan sarana ibadah, pembangunan sarana pendidikan dan lain sebagainya. Pada tahap perencanaan masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya usulan masalah tersebut dibawa oleh perwakilan RT/RW ketingkat Musyawarah Desa agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mendapatkan solusinya. Rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa, kepala wilayah dan ketua-ketua RT”, Wawancara, Rofi’i, 28 Maret 2022

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan/Kota hingga tingkat Provinsi Dan Pusat/Nasional. Penelitian ini difokus pada musrenbang Kelurahan/Desa. Pada pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat proses dilaksanakan berperdoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Kaligading yang di hadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, BPD.

Masyarakat tidak melaksanakan pada tahap pra dan pasca Musrenbang dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk langsung saja pada acara inti musyawarah yang diadakan dibalai desa Kaligading. Adapun yang terjadi di Desa Kaligading hanya dititik beratkan pada aspek pelaksanaan saja sehingga tahapan pra dan pasca musrenbang cenderung tidak terlalu dianggap penting. Tahun 2007 sendiri perencanaan penggunaan ADD di Desa Kaligading masih terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan masjid, betonisasi jalan desa, pamsimas dan puskesdes. Pada tahap perencanaan sejauh ini dapat dilihat dalam dua sudut pandang yakni yang pertama pemerintah desa dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan mengajak masyarakat berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa yang terdapat di ADD, yang kedua perencanaan pengelolaan ADD di Desa Kaligading masyarakatnya ikut serta dalam menggali potensi yang dimiliki. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa

Kaligading bentuk partisipasinya yaitu masyarakat ikut menyumbangkan pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat memberi masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam pembangunan desa.

Kita bisa melihat bahwa segala perkara dunia dalam suatu pembangunan maupun urusan lainnya hendaklah dimusyawarahkan begitu halnya perencanaan pembangunan yang ada di Desa Kaligading hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum hendak mengambil keputusan agar apa yang direncanakan bisa direncanakan dan bisa dijalankan dengan baik dan nantinya tidak akan ada kesalahfahaman satu dengan yang lainnya.

2. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa Di Desa Kaligading



Wawancara Bersama Pak Rofi'i selaku Kepala Desa Kaligading 28 Maret 2022

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak Rofi'i selaku kepala Desa Kaligading, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, beliau berkata: “Begini mbak, ketika masyarakat ikut serta dalam musyawarah, masyarakat kami berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau ide-ide terkait tentang apa yang mau di bangun di Desa ini, kemudian dari sekian banyak ide dan masukan yang telah mereka berikan harus mengambil keputusan mana

pembangunan yang harus diprioritaskan, jadi kami juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan”. Wawancara, Rofi’i, 28 Maret 2022.



Wawancara Bersama Pak Sahri selaku Anggota BPD Desa Kaligading
29 Maret 2022

Bapak Sahri, selaku anggota BPD di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal juga memaparkan ketika di wawancara, beliau berkata:“iya, masyarakat juga ikut andil dalam pengambilan keputusan , karena kami juga tidak mau mengambil keputusan tanpa disetujui oleh masyarakat Desa Kaligading ini mbak”. Wawancara, Sahri, 28 Maret 2022.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Chamdani selaku kepala wilayah I sebagai berikut :

“iya,dalam pengambilan keputusan masyarakat juga ikut terlibat kok mbak, terlebih masyarakat yang ikut musyawarah dan memberikan masukan-masukan atau ide-idenya itu mbak. Memang benar kami bermusyawarah bersama masyarakat, serta dalam pengambilan keputusan pun masyarakat ikut terlibat , bahkan hasil keputusan itu atas dasar kesepakatan masyarakat mbak”.

Terkait dengan pertanyaan diatas, hal sedemikian juga disampaikan oleh saudara Fandi sebagai berikut:

“Iya tentu mbak, kan kami masyarakat juga ikut musyawarah bersama dengan aparaturnya Desa, jadi saat musyawarah masyarakat juga memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang pembangunan desa yang akan dibangun, jadi dalam pengambilan keputusan kami masyarakat juga mengambil keputusan yang sesuai dengan masukan atau saran dari kami”. Wawancara, Fandi, 29 Maret 2022.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, sebagaimana masyarakat telah memberikan masukan dan saran-saran ketika bermusyawarah, kemudian masyarakat juga terlibat dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dibuktikan dengan kesepakatan antara masyarakat dengan aparaturnya Desa, bukan kesepakatan dari aparaturnya Desa dan masyarakat, artinya bahwa keputusan muncul dari bawah (masyarakat), atas dasar sumbangan pemikiran, dan masukan-masukan yang telah diungkapkan oleh masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Desa Kaligading

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang harus ada dalam partisipasi masyarakat tersebut supaya partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan memberikan hasil yang diharapkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut. Untuk menggerakkan warga dalam berpartisipasi dalam pembangunan sangatlah mudah, kesadaran berpartisipasi ini di dorong adanya kesadaran akan pentingnya bekerjasama dalam menyongsong pembangunan. Yang mana dengan adanya gotong-royong dalam menjalankan program pembangunan di desa Kaligading, lambat laun manfaatnya akan dirasakan oleh warga juga.

Dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan warga masyarakat sendiri sangat menyambut baik akan beberapa program yang

dicanangkan oleh pemerintahan setempat. Namun, program tersebut di imbangi dengan pelaksanaan yang maksimal, seperti hadirnya saat rapat atau agenda yang telah disepakati. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah program kelembagaan masyarakat. Salah satunya adalah program pelaksanaan pembangunan yang berupa pembuatan talut, gorong-gorong, perbaikan infrastruktur baik jalan maupun pembangunan desa. Dalam rapat tersebut warga telah menyambut baik akan terlaksanakannya program pembangunan yang dinantikan saat ini juga. Dalam sebuah proses perkembangan suatu program kegiatan tentu harus ada selalu pendampingan, agar program yang berjalan selalu terkontrol dalam proses pelaksanaannya.

Dalam hal ini maka dibutuhkan motivasi dan dorongan dari pemerintahan desa juga agar tidak terjadinya suatu kelemahan dalam berpartisipasi masyarakat. Pemerintahan desa seharusnya selalu mengontrol untuk memberikan sosialisasi dan dorongan terhadap kegiatan apa yang sedang dikerjakan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dikerjakan. Pemahaman dari pemerintahan desa tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi warga masyarakat.



Wawancara Bersama Pak Purnomo selaku Ketua RT Desa Kaligading 29
Maret 2022

Hal ini diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Purnomo selaku ketua RT di Desa Kaligading sebagai berikut :

“Kami ini menginginkan jalan-jalan antar desa diperbaiki seperti sekarang ini, Ya... walaupun masih batu kan sudah enak dan tidak becek lagi. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dan hal yang sangat membanggakan ialah pembangunan-pembangunan yang sudah terlaksana karena pada tahun-tahun sebelumnya jalan-jalan masih parah (berlubang), kami ya... bersyukur Alhamdulillah karna sudah bagus walaupun masih banyak kekurangannya”.

4. Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Desa Di Desa Kaligading

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam program pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rofi'i selaku kepala Desa Kaligading, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi iya mengatakan:

“Yang melakukan pemantauan dan evaluasi adalah aparaturnya Desa Kaligading bersama dengan ketua Pelaksana Program Pembangunan Desa Kaligading. Namun masyarakat juga ikut terlibat didalam pemantauan dan evaluasi, sehingga dengan begitu kami mengetahui apa saja kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan pembangunan yang desa dijalankan”. Wawancara, Rofi'i, 28 Maret 2022.

Senada dengan hal itu, Bapak Sahri juga berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, di desa Kaligading ini sebagai berikut :

“Masyarakat juga ikut melakukan pemantauan dan evaluasi , walaupun masyarakat yang tidak ikut dalam pelaksanaannya, akan tetapi masyarakat sebagian melakukan pemantauan dari depan rumah sambil ngopi, santai serta melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan, karena memang pemantauan ini perlu mbak, untuk melihat kesesuaian hasil pembangunan dengan apa yang

sudah kami rencanakan bersama masyarakat. Kami melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur tersebut, kami pantau dalam pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana, karena kami juga takut nantinya berbeda antara perencanaan dan hasil yang nanti akan kita nikmati bersama masyarakat”. Wawancara, Sahri, 28 Maret 2022.

Keterlibatan masyarakat terhadap pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kantor Desa, Pembuatan Talut, betonisasi dan Pamsimas yang ada di Desa Kaligading adalah berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Rofi'i sebagai berikut :

“Kami masyarakat juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, karena kami masyarakat tidak ingin perencanaan yang telah kami susun dari awal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kami masyarakat juga melakukan pemantauan terhadap pembangunan yang dilakukan, jika ada pihak-pihak yang menyeleweng kami masyarakat sudah sepakat secara tegas melaporkan kepihak yang berwajib. Masyarakat disini juga melakukan pemantauan terhadap pembangunan infrastruktur Desa di Desa Kaligading ini mbak, khususnya memang terhadap program pembangunan desa ini, karena apabila ada yang tidak sesuai kami masyarakat disini langsung mengomentari dan mengkritisnya jika kami biarkan saja, takutnya ada penyelewengan”. Wawancara, Rofi'i, 28 Maret 2022.

Ternyata setelah peneliti juga melakukan wawancara atau interview dengan Bapak Purnomo sebagai berikut: “Benar, kami disini sebagai masyarakat tidak mau hanya sebagai penonton, jadi kami juga melakukan pemantauan ketika pembangunan itu dilakukan, tapi alhamdulillah disini pembangunan sudah bagus”.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka penulis melihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur Desa pembangunan kantor Desa, pembuatan talud, pamsimas dan infrastruktur yang berupa jalan yang diadakan oleh program pembangunan desa

adalah, bahwa masyarakat juga terlibat dalam pemantauan dan evaluasi, dan masyarakat juga mengawasi dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, karena masyarakat ada penyelewengan atau ketidak sesuaian antara apa yang telah direncanakan dari awal.

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa di Desa Kaligading

Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan asumsi apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembagunan berarti masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan infrastruktur baik berupa sarana dan prasarana tersebut adalah agar desa Kaligading memiliki suatu perubahan dengan adanya pembangunan yang tidak tertinggal seperti desa-desa yang lainnya.

Hal ini lebih jauh lagi dari sekedar menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara hasil pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepedulian masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut. Sedangkan partisipasi pemeliharaan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana di Desa Kaligading dalam hal ini di serahkan kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan yang telah terlaksana ini tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa Kaligading didalam pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, untuk setiap warga masyarakat harus sadar akan pentingnya menjaga fasilitas yang sudah terpenuhi. Hal ini di tuturkan oleh Bapak Rofi'i menurutnya pada kegiatan pemeliharaan pembangunan ini tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa Kaligading untuk memelihara bangunan yang sudah ada.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Pada bab ini akan membahas mengenai temuan-temuan dan dapat penelitian yang telah di lakukan. Temuan-temuan dilapangan diuraikan dan penyajian data ini tersaji berupa uraian mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya gotong-royong di Desa Kaligading, pola partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di desa, dan implikasi teori partisipasi.

Hasil penelitian diuraikan dari jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Informan yang di wawancarai dalam penelitian merupakan narasumber yang menjadi pihak yang terpengaruh secara langsung oleh partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Pemaparan dalam bab ini akan dilakukan dengan menguraikan jawaban dari rumusan masalah. Adapun pemaparan awal akan dilakukan dengan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam upaya gotong-royong di Desa Kaligading. Lebih lanjut pemaparan akan dilakukan dengan menganalisis pola partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading dan implikasi teori partisipasi.

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Gotong-royong di Desa Kaligading

Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang telah lama terlaksana ditengah kehidupan masyarakat dan telah menjadi budaya bangsa Indonesia yang harus terus dibina dan dipertahankan, karena disamping memang merupakan warisan leluhur nenek moyang, namun pada kenyataannya merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk pelaksanaan pembangunan. Sikap gotong-royong tersebut seharusnya dimiliki oleh semua elemen dan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Sebab dengan dimiliki kesadaran itu, semua lapisan masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan semua kegiatan dengan

cara gotong-royong. Dengan begitu semua hal yang akan dikerjakan akan lebih mudah dan juga cepat diselesaikan serta lebih lancar dan maju. Tak hanya itu saja dengan adanya kesadaran semua masyarakat dalam menerapkan gotong-royong tersebut, maka akan tercipta hubungan silaturahmi yang semakin erat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rofi'i selaku Kepala Desa Kaligading sebagai berikut :

“orang orang yang nggak mau diajak gotong royong sebenarnya adalah orang" yang malas diajak ibadah sosial. Karena gotong royong dalam kebaikan juga disebut amal jariyah, bukan hanya harta melainkan tenaga juga. Serta kegiatan gotong-royong juga menjadikan pekerjaan kita menjadi ringan dan cepat selesai mbak, di desa iniyang mengikuti tahapan-tahapan sampai pelaksanaan gotong-royong dan partisipasi masyarakat adalah antara lain Kepala Desa, BPD, perangkat desa, karang taruna, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, wakil masyarakat dan yang bersangkutan lainnya”. (Wawancara, Rofi'i 28 Maret 2022)

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi. (Isbandi 2007 : 27). Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan.

Secara umum terdapat tiga langkah strategis dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Kaligading. Pertama, upaya rasional yang dilakukan adalah melakukan internalisasi nilai-nilai universal seperti kejujuran, kegotong-royongan, kebersamaan dan lain-lainnya. Upaya bisa dilakukan melalui berbagai forum pertemuan, pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diselenggarakan untuk pemangku kepentingan dan aktor-aktor pemberdayaan masyarakat. Maka pendekatan untuk mendorong partisipasi

masyarakat yang digunakan sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis Desa Kaligading.

Kedua, kelembagaan partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat yang konsen terhadap isu-isu pembangunan di desa dan lembaga pemerintahan desa yang representatif, akuntabel, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Ketiga, menyediakan bantuan langsung kemsayarakatan secara transparan untuk menandakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Strategi ini ditempuh dengan melalui pembangunan ekonomi lokal, pembangunan sarana atau prasarana desa, pembangunan SDM berupa kegiatan pelatihan-pelatihan ditingkat masyarakat.

Dalam kaitan dengan ketiga strategi diatas, kerangka kebijakan pembangunan desa dalam UU Desa telah memberikan peluang bagi usaha tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kaligading dengan wadah dan regulasi yang jelas. Persoalannya adalah bagaimana pengawalan terhadap implementasi regulasi tersebut. Sebaik apapun kebijakan dirumuskan apabila pengawalan implementasinya tidak optimal maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Termasuk dalam konteks perencanaan pembangunan terpartisipatif melalui implementasi UU Desa.

Sedangkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading tersebut adalah ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Anggota masyarakat bukan merupakan obyek pembangunan. Kedudukan sebagai subyek pembangunan berarti anggota masyarakat memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerjasama, prakarsa (motivasi) dan wawancara yang kuat melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading.

Bertambah pentingnya kedudukan anggota masyarakat tersebut dapat diartikan pula bahwa anggota masyarakat diajak berperan secara aktif, didorong

untuk berpartisipasi dan implementasi program atau proyek. Anggota masyarakat diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi menurut Adi Sasmita, (2006:36-37). Karena masyarakat dianggap bahwa mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan lingkungan, yang dirincikan sebagai berikut :

1. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya.
2. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kegiatan yang terjadi dalam masyarakat.
3. Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
4. Mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM dan Teknologi). Yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya.
5. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan bidang SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan pertimbangan tersebut, maka diharapkan rencana (program) pembangunan masyarakat Desa Kaligading akan dapat disusun dengan sebaik-baiknya.

Poerwoko dan Soebiato mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang

memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

3. Partisipasi Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

4. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil

pembangunan akan merangsang kemampuan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Pada penjelasan diatas dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Kaligading sudah mencapai tahapan-tahapan tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh Purnomo salah satu warga desa Kaligading.“ Kalau dalam pelaksanaan partisipasi insya Allah kami selalu diajak atau di ikutsertakan, mulai dari MusDus (musyawarah dusun), MusDes (musyawarah Desa), sosialisasi desa sampai musrenbang”. (Wawancara, Purnomo, 29 Maret 2022).



Wawancara Bersama Pak Chamdani selaku Kepala Wilayah 1 Desa Kaligading 29 Maret 2022

Hal serupa juga di ungkapkan Pak Chamdani selaku Kepala Wilayah 1 Desa Kaligading sebagai berikut :

“kalau menurut saya, pada saat ikutserta dalam melakukan partisipasi masyarakat semua elemen yang ikut disama ratakan porsinya karena sama-sama mengikuti kegiatan gotong-royong. Sebelum melaksanakan tahapan-tahapan tersebut sudah diadakan musyawarah mufakat MusDus kemudian MusDes dan seterusnya mbak”. (Wawancara, Chamdani, 29 Maret 2022)

Musyawarah desa atau musdes tersebut adalah proses musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Karena didalam musyawarah, semua pihak dapat mengemukakan pendapat dengan sebenarnya dan pendapat tersebut didengarkan oleh orang lain. Mereka lalu dapat berdiskusi dengan bebas, namun tetap saling menghormati. Sehingga, musyawarah bermanfaat mengurangi kesalahpahaman dan menyatukan perbedaan pendapat. Adapun untuk pendanaan dari terlaksananya musyawarah ini sendiri, itu di biayai dan di fasilitasi menggunakan dana yang berasal dari pemerintah desa. Seperti halnya yang di ungkapkan Pak Sahri selaku anggota BPD di Desa Kaligading sebagai berikut :

“Pertama melakukan musdes, karena untuk musyawarah menentukan letak bangunan yang akan di realisasikan. BPD menerima usulan-usulan dari dusun, dari mulai apa yang akan di bangun, yang akan di benahi dan apa yang akan di danai, tapi tidak semua usulan ditampung, jadi mana yang harus di prioritaskan jadi di bangun dulu, karena dana desa terbatas. Kata badan BPD misal gini, kan ada 5 titik usulan, tapi dana desa tahun ini hanya bisa mencakup 2 titik, jadi yang 3 titik di tampung dulu dan akan dibangun di tahun yang akan datang”. (Wawancara, Sahri, 28 Maret 2022)

Karena pada dasarnya kedudukan BPD dalam pemerintahan desa: berdasarkan UU Desa dan Permendagri No. 110/2016, BPD bukan unsur pemerintahan desa tetapi memiliki fungsi pemerintahan. Setiap aspirasi atau aduan warga desa dapat diserap dan di kelola oleh BPD untuk disalurkan atau ditindak lanjuti bersama pemerintah desa melalui MusDes yang diselenggarakan oleh BPD. Ini artinya, kedudukan BPD sangat strategis karena sejajar dengan pemerintah desa. BPD merupakan Badan Permusyawaratan di Tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi BPD itu sendiri membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mengawasi kinerja Kepala Desa. Tugas BPD yaitu :

1. Menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menyelenggarakan musyawarah BPD
3. Menyelenggarakan MusDes
4. Menyelenggarakan MusDes khusus Pilkades antar waktu
5. Membentuk Panitia Pilkades
6. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerdes dan lembaga desa lainnya
7. Membahas dan menyepakati rancangan Perdes



Wawancara Bersama Ibu Jumiyah Rofi'i selaku Ketua PKK Desa Kaligading 30
Maret 2022

Sama halnya peran PKK yang juga ikutserta dalam proses gotong-royong dan partisipasi di Desa Kaligading. Karena mulai dari sosialisasi di warga, konsumsi dan lain-lain. Karena peran PKK di masyarakat adalah sangat-sangat penting seperti halnya yang di ungkapkan Ibu Jumiyah Rofi'i selaku Ketua PKK di Desa Kaligading sebagai berikut :

“PKK sebagai partner mitra kerja pemerintah desa karena semua kegiatan hampir melibatkan unsur PKK apalagi sekarang ini ada kegiatan mencegah stunting, sampai dibagian penyuluhan juga melibatkan PKK, mulai dari KDRT, pola asuh anak, keterampilan masyarakat, wadah dari asuransi masyarakat juga, karena visi dan misi PKK mensejahterakan lahir dan batin masyarakatnya. Alhamdulillah untuk

mengenai partisipasi masyarakat di Desa Kaligading ini sudah menjadi budaya karena meringankan beban masyarakat tentunya karena dana desa untuk pembangunan infrastrukture masih kurang jadi, alhamdulillah sekali masyarakat untuk gotonh-royong tersebut masih melakukannya 90%”. (Wawancara, Jumiya Rofi'i, 30 Maret 2022)

B. Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa

Pembangunan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat harus mau ikut terlibat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Tujuan utama pembangunan ialah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan. Menurut Asep Nurwanda dalam jurnal Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa) (2018), partisipasi masyarakat adalah upaya keterlibatan masyarakat untuk mendukung terlaksananya suatu program. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengembangan hasil pembangunan yang akan dicapai.

Dr. Sudarshan dalam jurnal Syamsul Wathoni (2006) mensyaratkan bahwa partisipasi maksimal hanya bisa dilakukan dengan memperhatikan dua hal mendasar Pertama; struktur kelembagaan yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri. Kedua; representasi masyarakat yang terwakili secara proporsional didalam setiap proses pengambilan kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan bersama. Namun begitu, Ignas Kleden (2004) melihat partisipasi bukan dari kuantitas, yang lebih menekankan pada angka-angka dan jumlah warga yang berpartisipasi akan tetapi lebih pada kualitas wacana partisipasi yang dikembangkan. Kualitas wacana yang dimaksud ditentukan oleh dua aspek; argumentasi yang baik dan mempunyai dasar yang kuat, kepentingan yang lebih luas yang dipertaruhkan. Agar partisipasi lebih bermakna, argument untuk partisipasi dan akuntabilitas institusional harus didasari oleh konsepsi hak, yang dalam konteks pembangunan memperkuat status warga negara. Jika semula warga dirumuskan sebagai pemanfaat, sekarang ini sudah harus diposisikan sebagai pihak yang berhak dan sah atas pembangunan itu.

Selanjutnya Asngari (2001) menyatakan bahwa, penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama. Adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang- orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak diperlukan : (a) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis dan (b) terbinanya kebersamaan. Dilansir dari situs Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sifatnya sukarela. Artinya masyarakat dapat terlibat secara sukarela dalam setiap kegiatan pembangunan. Setidaknya ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Berikut penjelasan beserta contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Untuk pembangunan daerah, masyarakat juga memegang peran penting dalam pengambilan keputusan. Sehingga hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah setempat, melainkan juga turut melibatkan masyarakat. Contohnya mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan, menyampaikan pendapat terkait pembangunan, dan lain sebagainya.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Contohnya turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana atau memberi sumbangan uang tunai, dan lainnya.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan serta evaluasi Artinya masyarakat juga turut memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan. Tujuannya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya korupsi, suap, atau lainnya. Contoh partisipasinya ialah memberi kritik saran, turut andil dalam mengawasi proses pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya, dan lainnya.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan Setelah pembangunan selesai dilakukan, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemanfaatan hasilnya. Supaya tidak sia-sia dan memang digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Contoh

partisipasinya ialah memanfaatkan serta menggunakan jembatan, merawat fasilitas umum, dan lainnya. Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga bisa dilakukan dengan selalu membayar pajak tepat waktu, tidak merusak fasilitas umum, ikut terjun dalam kegiatan pembangunan, kompak dan rela bekerja sama tanpa memperhatikan perbedaan yang ada, dan lain sebagainya.

Salah satu upaya yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan disetiap desa adalah dengan meningkatkan kinerja pembangunan, dimana dengan adanya peningkatan kinerja maka akan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena, maka dalam menunjang kinerja pembangunan, perlu ditunjang oleh adanya perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu langkah strategis yang disusun oleh pemerintah daerah yang melibatkan sektor swasta, maupun kelompok masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan daerah, guna pelaksanaan pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan.

Dalam melakukan pembangunan desa, salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya visi dan misi dalam pembangunan desa adalah tingkat partisipasi masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan, sebab tanpa keterlibatan langsung pihak masyarakat dan swasta yang membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan pembanguana desa, maka segala visi dan misi yang ditetapkan dalam pembangunan tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan.

Pentingnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa, maka perlu dilakukan penyusunan formulasi kebijakan perencanaan desa. Hal ini dimaksudkan untuk merumuskan dan melembagakan program atau kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, selain membangun kepercayaan dan mengakselerasikan

keterpaduan aspirasi masyarakat dalam perumusan dan penentuan program dari kegiatan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma budaya, etika dan moral serta sesuai visi dan misi pembangunan.

Pada tahap perencanaan partisipatif pembangunan desa, partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi dalam menganalisa masalah, yang menuju ke arah rencana tindakan dan pembentukan kelompok lokal baru atau memperkuat yang ada. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan lebih menekankan pengambilan keputusan secara sadar oleh masyarakat atas pilihan-pilihan yang tersedia. Keseluruhan tahapan kegiatan perencanaan pembangunan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk membangun dukungan dan kepercayaan kepada masyarakat; membangun relasi yang luas dan kuat dengan masyarakat, mempersiapkan kader-kader lokal dan sebagai upaya membangkitkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerjasama masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaligading adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif digunakan agar masyarakat dapat menjadi pelaku utama di dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Pendekatan ini juga menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan pembangunan desa. Dalam kaitannya, berikut ini akan dirumuskan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menurut pendapat Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:25) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk – bentuk partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Desa Kaligading dalam Perencanaan Pembangunan.

Tahapan program pembangunan Desa Kaligading yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat berjalan dengan lancar dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa Kaligading. Masyarakat terlibat secara langsung mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Perencanaan yang matang sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien oleh karena itu peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan. Perencanaan pembangunan

disusun berdasarkan hasil rembuk desa yang diikuti oleh semua perangkat desa dan keterwakilan masyarakat Desa Kaligading. Setelah melakukan sosialisasi tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Musrenbang desa.

2. Partisipasi Masyarakat Desa Kaligading dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan Desa Kaligading dapat berjalan dengan lancar karena adanya partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Karena partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam proses pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka proses pembangunan akan mengalami hambatan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat Desa Kaligading dalam Bentuk Tenaga. Bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat Desa Kaligading dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kaligading yaitu dalam bentuk tenaga. Masyarakat Desa Kaligading bergotong-royong dalam membangun desa dengan sukarela.
- b. Partisipasi Masyarakat Desa Kaligading dalam Bentuk uang. Pembangunan desa tidak terlepas dengan adanya uang, meskipun tidak semua masyarakat memberikan bantuan berupa uang.
- c. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Bahan (Material) Partisipasi masyarakat Desa Kaligading dalam pembangunan desa juga diwujudkan dalam bentuk material atau bahan. Masyarakat memberikan bantuan material berupa pasir atau batubahkan banyak masyarakat yang memberikan bantuan berupa makanan ketika proses pembangunan desa berlangsung. Masyarakat melakukan hal ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun tetapi masyarakat sadar dengan asas gotong-royong untuk mewujudkan pembangunan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Kemanfaatan Desa Kaligading.

Pembangunan Desa Kaligading melibatkan aparatur pemerintahan desa dan seluruh masyarakat Desa Kaligading. Selain itu, pembangunan desa juga membawa manfaat secara langsung bagi anggota masyarakat. Kelompok yang

mendapatkan manfaat secara langsung adalah masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari pelaksanaan pembangunan desa yang perlu diperbaiki. Tahap evaluasi dilakukan di dalam musyawarah desa, hingga kini sering kali dilakukan evaluasi terhadap pembangunan Desa Kaligading. Selain itu, evaluasi jugadilakukan melalui kerja bakti untuk menjaga lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas diketahui bahwa suatu keberhasilan pembangunan membutuhkan kerjasama antara pihak yang terkait dengan seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah Desa Kaligading serta seluruh anggota masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan Desa Kaligading.Pemerintah Desa Kaligading dalam menyelenggarakan pembangunan desa dan selalu melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat Desa Kaligading dengan mengadakan musyawarah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti Musrenbang merupakan bukti bahwa masyarakat mendukung program pembanguan Desa Kaligading.

Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Dalam buku Pemberdayaan Masyarakat (2010) karya Sawa Suryana, partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan mereka, seperti: Keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat, Mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat, Mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat dan Mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam pembangunan.

Dalam jurnal Bentuk-Bentuk Partisipasi masyarakat Desa dalam Program Dewa Siaga di Desa Bandung Gunung Kidul (2013) karya Nuring Septyasa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut: a) Partisipasi pikiran Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat. b) Partisipasi tenaga Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan tenaga. c) Partisipasi harta Partisipasi ini dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa harta atau uang dan makanan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, bentuk-bentuk partisipasi dapat dibagi menjadi empat pengertian, yaitu:

1. Partisipasi dapat bersifat transitif atau intrasintif.
2. Partisipasi bermoral atau tidak bermoral. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika.
3. Partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifat bebas.
4. Partisipasi yang bersifat manipulatif atau spontan.

Sedangkan pada Tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat desa Kaligading adalah suatu proses kegiatan yang berawal dari implementasi awal, implementasi, dan implementasi akhir. Tahap perancangan Dalam tahap ini partisipasi masyarakat dapat diketahui melalui keaktifan menghadiri sosialisasi, musyawarah, penyuluhan, dan pelatihan yang diadakan pemerintah desa. Dalam tahap perencanaan tersebut masyarakat juga ikut menyumbang pikiran. Hasil dari partisipasi ini, merupakan terbentuknya organisasi kepengurusan tingkat desa. Tahap pelaksanaan Dalam tahap ini partisipasi masyarakat dapat diketahui melalui keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Tahap penilaian. Dalam tahap keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana. Serta sejauh mana hasil dari pembangunan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

C. Implikasi Teori Partisipasi

Implikasi Teori adalah tambahan temuan baru pada teori yang sudah ada atau bahan untuk menciptakan teori baru. Dimana dalam perspektif jenis pendekatan penelitian, peran penting teori adalah menyediakan bidang-bidang yang menarik dan mungkin menjanjikan untuk dikerjakan.

No	Landasan Teori	Penjelasan Teori
1.	Teori Partisipasi	Menurut Selamet (dalam Suryono\2011:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan Masyarakat Desa Kaligading telah melakukan perannya sebagai masyarakat yang ikut terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang keterampilan bahan dan jasa.
2.	Partisipasi Inisiasi	Hoofsteede (1971:25) Partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagimasyarakat.
3.	Partisipasi Legitimasi	Partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
4.	Partisipasi Eksekusi	Partisipasi pada tingkat pelaksanaan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan tahap-tahap pembahasan tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Kaligading sebagian besar dapat dikatakan ikut berpartisipasi. Dimana lebih banyak yang ikut aktif dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di desa Kaligading. Pemerintah desa setempat juga ikut berpartisipasi dan ikut campur tangan mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur di desa Kaligading ini. Pemerintah desa juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa kerjasama adalah hal yang sangat bagus dibangun dalam jiwa setiap masyarakat, agar tidak memutus tali silaturahmi, dan juga menjadikan tidak adanya sifat egois, iri serta dengki. Tingkat partisipasi masyarakat Kaligading dalam pembangunan dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan maupun pemeliharaan yang tergolong baik.
2. Arena yang digunakan warga berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu dengan Partisipasi inisiasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa baik formal maupun informal maupun kebutuhan masyarakat, dan partisipasi tersebut mempunyai kadar yang lebih tinggi dibanding partisipasi legitimasi dan partisipasi eksekusi. Kemudian partisipasi legitimasi yang terjadi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang suatu proyek seperti jika masyarakat hanya ikut dalam tahap pembicaraan seperti rembug desa. yang terakhir adalah partisipasi eksekusi yang pada tingkat pelaksanaan dan merupakan partisipasi terendah dari semua tingkatan, masyarakat hanya turut serta dalam pelaksanaan proyek tanpa ikut serta menentukan dan membicarakan proyek tersebut, hal tersebut telah dibuktikan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan untuk menjelaskan spesifikasi detail pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan ke pelaksana kegiatan. Musyawarah tersebut meliputi :

pertama mulai dari Musdus (musyawarah dusun), Musdes (musyawarah desa), sosialisasi desa sampai musrenbang dan pada tahap selanjutnya. Masyarakat sangat berpartisipasi dapat dilihat dari kepedulian dalam kemajuan pembangunan infrastruktur dan perencanaan desa. Arena tersebut meliputi membangun jalan rapat beton sejak tahun 2010. Komposisi pembuatan cor betonisasi jalan desa yaitu masyarakat juga memilih bahan yang berkualitas yaitu coral, pasir, semen, dan bahan-bahan lainnya, tidak seperti mesin molen pada umumnya.

3. Tidak ada preferensi politik dominan siapapun yang mempengaruhi proses pembangunan karena dengan bergotong royong membuat masyarakat menjadi lebih kompak dan bisa lebih mengenal satu sama lain. Semua tugas yang dilakukan akan terasa menjadi ringan dan cepat selesai. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat di Desa Kaligading.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian antara praktik di lapangan, kesimpulan dan saran yang ada, maka dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pemerintah diharapkan untuk memberikan perhatian terkait dalam proses gotong royong dan partisipasi masyarakat tersebut dengan tujuan untuk memupuk serta membina semangat gotong royong masyarakat yang juga merupakan budaya Indonesia agar tidak terkikis oleh arus modernisasi yang semua mengedepankan materi sebab dari itu, gotong royong akan memudar apabila rasa kebersamaan itu mulai menurun dan jangan sampai nilai-nilai kebersamaan yang selama ini dijunjung tinggi menjadi tidak ada artinya lagi.
2. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa ikut dalam melaksanakan kegiatan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut merupakan suatu kewajiban yang memang harus di laksanakan secara bersama-sama dengan tujuan mendapat hasil yang maksimal dan dapat menambah kekompakan dan berbagai manfaat yang lainnya.

3. Untuk masyarakat umum tanpa terkecuali khususnya para generasi muda yang ada di desa kaligading ini hendaknya mengenal lebih jauh tentang gotong royong dan partisipasi masyarakat serta melestarikan budaya dan menjadi peran utama dalam proses pembangunan. Untuk mempertahankan keutuhan sistem sosial ini supaya jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama dan memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan-aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama. 2010
- Huraerah, *Pengorganisasian, Pengembangan, Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2008.
- Isbandi, R. 2001. *Perberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moelong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Jakarta: Pustaka Nadi, 2011.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Rifka, Linda Singal, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Pembangunan Desa*.
- Sawa Suryana, *buku Pemberdayaan Masyarakat (2010)*.
- Soetrisno, Loekman (1995), *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius Yogyakarta
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), h. 40-41.
- Suparjan dan Hempri, *Partisipasi Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan*, Bandung: Orba Shakti. 2003.

Jurnal

- Abdur Rahman, Rosmita. Tahun 2019. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Volume 1 Nomor 2, Mei 2019.
- Artikel data kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kendal semester II tahun 2021
- Dewi, Sawitri (2006), Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengembangan Lokal, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol.17/ No.1 April 2006.10.
- Hakim, Lukmanul. Tahun 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 2 Nomor 2, November 2017.
- Hayati, Nurul. Tahun 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 1. Tahun 2017.
- Nuring, Septyasa . Tahun 2013. Jurnal Bentuk-Bentuk Partisipasi masyarakat Desa dalam Program Dewa Siaga di Desa Bandung Gunung Kidul.
- Parma, I Putu Gede. Tahun 2011. Faktor-faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Festival Pesona Pulau Serangan Di Kota Denpasar. *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Triyatma Jaya*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2011.

Skripsi

- Isbandi, Rukminto Adi, 2007. Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Jumsar, Akbar Saputra. Tahun 2020. Jurnal “Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Bram Itam Kanan Kec. Bram Itam Kab.Tanjung Jabung Barat)”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Kurniyati, Yuni. Tahun 2019. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara”. *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. (di unduh pada 28 Mei 2022 pukul 03:33).
- Lister. Tahun 2005. “Gotongroyong, Musyawarah dan Mufakat Sebagai Faktor”.*Skripsi* FISIP UNSRIYogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005. (di unduh pada 30 Mei 2022 pukul 10:30).
- Nur Azizah, Rosfa. Tahun 2017. “Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. (di unduh pada 01 Juni 2022 pukul 22:30).
- Sendy, Ayu Ari. Tahun 2020. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dimediasi Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”. *Skripsi*

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. (di unduh pada 1 Juni 2022 pukul 22:19).

Slamet, Margono. 2003. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan. Di dalam : Ida Yustina dan Adjat Sudradjat, editor. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor : IPB Press.

Tjokromidjojo, Bintoro, 2005. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Mas Agung.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. (di unduh pada 4 April 2022 pukul 12:34). Depok: Fisip UI press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114, Tahun 2.014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :a. Bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu di atur sendiri dengan undang-undang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, andaikan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalm sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dfengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

LAMPIRAN WAWANCARA

Transkrip Wawancara

Tanggal : 28 Maret 2022

Tempat : Kantor Kelurahan

Informan : Kepala Desa Kaligading

Data Pribadi Informan

1. Nama : Rofi'i
2. TTL : Kendal, 03 September 1968
3. Umur : 54 Tahun

P : Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam proses gotong royong pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

I : Partisipasi masyarakat dimulai dari kegiatan sosialisasi ke dusun-dusun, kemudian musyawarah desa (musrenbangdes), kemudian proses notulensi yaitu dalam kegiatan musrenbangdes ada bagian menulis untuk nanti untuk di realisasikan pada pembangunan, serta adanya swadaya masyarakat Desa Kaligading karena gotong royong dalam Pembangunan Desa bukan hanya tenaga dan pikiran saja melainkan adanya swadaya dari beberapa masyarakat. Pak kades juga menjelaskan bahwa orang-orang yang nggak mau diajak gotong royong sebenarnya adalah orang-orang yang malas diajak ibadah sosial Karena gotong royong dalam kebaikan juga disebut amal jariyah, bukan hanya harta melainkan tenaga juga.

P : Apa arena yang digunakan warga dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ?

I : Masyarakat sangat berpartisipasi dapat dilihat dari kepedulian dalam kemajuan pembangunan infrastruktur dan perencanaan desa. Arena tersebut meliputi membangun jalan rapat beton sejak tahun 2010. Komposisi pembuatan cor betonisasi jalan desa yaitu masyarakat juga memilih bahan yang berkualitas yaitu coral, pasir, semen, dan bahan-bahan lainnya, tidak seperti mesin molen pada umumnya. Kalau rapat beton harus memang dibantu orang banyak, soalnya pekerjaan berat, nggak mungkin orang sedikit, karena lebih berkualitas kalau masyarakat mengetahui bahan" material nya, bisa hemat biaya juga kan Karena memang masyarakat sudah konsisten sama sosialisasi nya

P : Preferensi politik dominan siapa yang mempengaruhi proses pembangunan infrastruktur di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ?

I : Tidak ada Preferensi Politik dari siapapun dan apapun. Karena masyarakat sudah mengetahui segala sesuatu kalau dikerjakan secara gotong royong, maka akan membuahkan kebaikan yang akan kita ambil manfaatnya.

P : Pada proses tersebut apakah melibatkan unsur perempuan dan remaja didalamnya atau tidak ?

I : Unsur perempuan dan remaja selalu dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut karena semua elemen saya ajak seperti remaja, tokoh masyarakat, BPD, RT RW dan lain sebagainya. Jangankan masyarakat, saya sendiri pun kalau ada piket ikut turun tangan dalam gotong royong tersebut saya pasti ikut mbak (itu yang menjadikan Pak Kades di segani masyarakat, bukan karena politik)

P : Dimana saja pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan di Desa Kaligading ?

I : Pembangunan di Desa Kligading yang sudah dilakukan yaitu : 2007 - 2009 masjid di dusun krajan dan air bersih di dusun masiran, 2008 air

bersih di dusun mlandang dan masjid Annur di dusun setukup, 2009 Talut di dusun blorong dan mengaspal jalan di dusun Krajan, masjid di dusun setro, 2010 rapat beton di dusun sidawung sama jembatan di dusun blorong, 2011 irigasi di dusun setro dan membiayai posyandu, dan musholla di dusun Krajan, 2012 rapat beton di mlandang dan setro, TPQ di dusun Krajan, 2014 bendungan sirampak sama rapat beton di dusun situkup, 2015 rapat beton di dusun mlandang sama TK, 2016 air bersih di dusun Krajan, 2017 sama rapat beton sirampak, 2018 rapat beton di dusun Krajan, betonisasi di dusun Krajan, Pamsimas di dusun masiran, 2019 rapat beton di dusun sidawung, 2020 kelanjutan betonisasi.

P : Mengapa gotong royong menjadi modal dasar pembangunan di Desa Kaligading ?

I : Karena di dalam gotong royong tersebut wajib hukumnya karena dapat menjadikan ajang silaturahmi, meringankan beban, dan semua pekerjaan terasa ringan, serta pekerjaan yang kita lakukan dapat segera selesai.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Proses Gotong Royong Pembuatan Betonisasi Jalan Desa Kaligading



Proses Pembangunan Talut Desa Kaligading



Pembangunan Jalan Infrastruktur Desa Kaligading



Pembangunan Jembatan Desa Kaligading



Pembangunan PAMSIMAS Desa Kaligading

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Malihatin
2. TTL : Semarang, 23 Februari 1997
3. Alamat : Desa Plamongansari Rt/Rw 01/03 Kecamatan Pedurungan Kabupaten Kota Semarang
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
7. Pendidikan
 - a. MI : MI INFARUL GHOY SEMARANG
 - b. MTS : MTS FUTUHIYYAH 2 MRANGGEN DEMAK
 - c. MA : MA FUTUHIYYAH 2 MRANGGEN DEMAK
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. PMII Rayon FISIP
9. No. Hp : 085645476503
10. E-mail : Atinabensoe19@gmail.com
11. Instagram : A_tinaben
12. Motto Hidup : Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juni 2022

TTD

(Malihatin)